



BALAI WILAYAH SUNGAI
SUMATERA VII

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

OPERASI DAN PEMELIHARAAN
SUMBER DAYA AIR SUMATERA VII
TAHUN ANGGARAN

2016



LAKIP OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VII TAHUN ANGGARAN 2016

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas berkat rahmatNya "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII Tahun Anggaran 2016" dapat disusun dan disajikan sebagai informasi tentang pencapaian kinerja dan evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya air dalam pengembangan dan pengelolaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Kebutuhan akan adanya good governance dalam pengelolaan keuangan negara telah mensyaratkan Satuan Kerja Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air untuk terus membenahi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan publik agar transparansi dan akuntabilitas keuangan publik dapat terus ditingkatkan. lebih dari sekedar melaksanakan amanat peraturan perundangan, LAKIP Stuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Tahun 2016 disusun ebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas akuntabilitas kinerja dan implementasi good governance di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kami berharap laporan ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan seluruh stakeholder sehingga menjadi media evaluasi kinerja Satuan Kerja Operasi dan Pemeliaraan Sumber Daya Air tahun 2015. Sangat disadari pula bahwa selesainya penyusunan laporan ini berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bengkulu, September 2016
Kepala Satker OP SDA Sumatera VII

Rosmaladewi, ST, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	11
1.3 STUKTUR ORGANISASI	15
1.4 GAMBARAN WILAYAH KERJA	23
1.5 HAMBATAN DAN TANTANGAN / ISU STRATEGIS	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	37
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	37
2.2 PERJANJIAN KINERJA	43
2.3 METODE PENGUKURAN	45
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	49
3.1 SUMBER DAYA MANUSIA	49
3.2 SARANA DAN PRASARANA	51
3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)	53
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	56
4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	56
4.2 PERBANDINGAN KINERJA	72
4.3 ANALISIS KINERJA	73
4.4 REALISASI ANGGARAN	76
BAB V PENUTUP	78
5.1 KESIMPULAN	78
5.2 REKOMENDASI DAN HARAPAN	79
LAMPIRAN FOTO	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII	22
Gambar 1.2 Peta Provinsi Bengkulu	26
Gambar 1.3 Peta Wilayah Sungai Balai Wilayah Sungai Sumatera VII	28
Gambar 1.4 Peta Wilayah Sungai Teramang Muar 01.38.A2	29
Gambar 3.1 Pegawai Satker OP SDA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Berdasarkan Status Kepegawaian	50
Gambar 3.2 Sistem e-Monitoring Kementerian PUPR	52
Gambar 3.3 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian PUPR	53
Gambar 3.4 Pagu Anggaran Es II/BBWS/BWS	54
Gambar 4.1 Rencana keuangan dan realisasi keuangan Satker OP SDA Sumatera VII	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	25
Tabel. 1.2 Wilayah Sungai Administrasi BWS Sumatera VII	26
Tabel. 1.3 Program Kerja Tahunan Anggaran 2016 Satker OP SDA Sumatera VII Provinsi Bengkulu	31
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII	44
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian	46
Tabel 3.1 Aset BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera VII	51
Tabel 3.2 Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII	54
Tabel 4.1 Realisasi capaian kinerja triwulan I Satker OP SDA Sumatera VII	57
Tabel 4.2 Realisasi capaian kinerja triwulan II Satker OP SDA Sumatera VII	61
Tabel 4.3 Realisasi capaian kinerja triwulan III Satker OP SDA Sumatera VII	65
Tabel 4.4 Realisasi capaian kinerja triwulan IV Satker OP SDA Sumatera VII	69
Tabel 4.5 Sandingan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016	72

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Sumber Daya Air (SDA) Sumatera VII mempunyai tugas dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan tugas membangun infrastruktur pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Dari pembangunan infrastruktur ini kemudian dapat tercapai sasaran output maupun outcome yang telah diteapkan pada rencana kinerja tahunan dan pada dokumen penetapan kinerja.

Pada tahun 2016 ini, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII memperoleh anggaran sebesar Rp. 29.300.344,-, dimana masing-masing anggaran dialokasikan ke 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA yaitu Rp. 7.337.145,- dialokasikan ke PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air I, Rp. 18.000.149,- dialokasikan ke PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air II, Rp. 3.963.051,- dialokasikan ke PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air III.

Pada tahun 2016 ini Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII berhasil memperoleh kinerja realisasi anggaran/keuangan sebesar Rp. 29.300.344,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 31.713.515,- dengan kinerja realisasi anggaran/keuangan masing-masing PPK sebagai berikut:

1. PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I sebesar Rp. 7.337.145,-
2. PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II sebesar Rp. 18.000.149,-
3. PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA III sebesar Rp. 3.963.051,-

Dalam penyempurnaan akuntabilitas kinerja, berbagai upaya telah dilakukan oleh Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII antara lain:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja.
- b. Penyusunan Laporan keuangan per paket kontrak dan per swakelola.
- c. Penyesuaian indikator kinerja dengan Renstra Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII tahun 2015-2019.
- d. Penyusunan laporan fisik per triwulan per PPK.

Hal-hal yang masih harus menjadi perhatian ke depannya dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

- a. Sinkronisasi antara Petugas e-Monitoring dan Bendahara masing-masing PPK di lingkungan Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII masih kurang jelas dan belum menemukan solusi yang terbaik agar laporan SPM dan SP2D yang harus diinputkan di aplikasi e-Monitoring oleh petugas e-Monitoring dapat tepat waktu dan tidak tertunda-tunda karena alasan yang kurang jelas.
- b. Penyerahan laporan progres fisik yang tepat waktu dari masing-masing PPK di lingkungan Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII yang masih lambat.
- c. Penyerahan foto masing-masing paket kegiatan yang harus menunggu lama untuk didapatkan dan kemudian diinputkan di aplikasi e-Monitoring.
- d. Belum terbentuknya Tim LAKIP per masing-masing PPK sehingga pengerjaan LAKIP masih bertumpu pada perseorangan yang berdampak pada pengerjaan LAKIP yang masih lama dan tidak bisa tepat waktu.

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, permasalahan, langkah-langkah antisipatif yang akan diambil, uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran Negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan), dan uraian singkat Renstra dan Renja tahun bersangkutan beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2016 dan kaitannya dengan capaian tujuan, misi dan visi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

LAKIP dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Oleh karena, Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII adalah salah satu Unit Kerja Mandiri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini di berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan juga merupakan satu dari 4 (empat) Satuan Kerja (Satker) pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII maka penjelasan berjenjang mulai dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, dirasa perlu untuk disajikan terlebih mengingat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII adalah 2 (dua) struktur tertinggi teratas dalam organisasi Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII.

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII adalah salah satu dari 4 (empat) satuan kerja yang berada di dalam lingkup di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII yang adalah atasan langsung Kepala Satker.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PU Nomor :15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, bagian kedua, paragraf 1, pasal 62 menyatakan bahwa:

- 1) Balai Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- 2) Balai Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian kedua pasal 63, Peraturan Menteri No.20/PRT/M/2016 Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
- e. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- f. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- g. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- h. Pengelolaan drainase utama perkotaan;
- i. Pengelolaan sistem hidrologi;
- j. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- k. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- m. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin usaha sumber daya air pada wilayah sungai; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;

BAB I

PENDAHULUAN

- n. Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- o. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- p. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- q. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
- s. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan
- t. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum, Paragraf 2 Pasal 66 Susunan Organisasi Balai Wilayah Sungai Tipe A, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan Umum dan Program;
- c. Seksi Pelaksanaan;
- d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 67, menyatakan bahwa :

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA), urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik., melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik

BAB I

PENDAHULUAN

barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

- b. Seksi Perencanaan Umum dan Program melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai
- c. Seksi Pelaksanaan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan,serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ,embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku
- d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik , persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan , dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri bahwa Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas dan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan Kementerian sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan. Pejabat Inti Satuan Kerja/ Pejabat Perbendaharaan terdiri atas :

- a. Kasatker/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
- d. Bendahara Pengeluaran.

A. Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII

Tugas :

1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU net.
3. Menetapkan Pejabat Pengadaan.
4. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
5. Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak.
Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA.
7. Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
9. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/ jasa dan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
10. Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I.

BAB I

PENDAHULUAN

11. Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/ Tim Ahli untuk pelaksanaan apabila perlu.
12. Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
13. Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
14. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan.
15. Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker yang dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsung.
16. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM.
17. Menandatangani Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak (dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
18. Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
19. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ lembaga (RKA-K/L) untuk tahun berikutnya.

Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/ rencana kerja yang tertuang dalam DIPA.
2. Bertanggung jawab atas semua penerimaan/ pengeluaran Satker yang membebani APBN.
3. Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak yang ditandatangani serta akibat yang timbul

BAB I

PENDAHULUAN

dari SK/ SPK/ Kontrak tersebut. (Dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).

4. Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan.
5. Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan peemliharaan Barang Milik/ Kekayaan Negara Satker.
6. Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/ Atasan Langsung/ Penanggungjawab Program.

B. Pejabat Pembuat Komitmen

Tugas :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi: Spesifikasi teknis Barang/ Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Kontrak.
2. Menertibkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa.
3. Menandatangani Kontrak/ Surat Perintah Kerja.
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa.
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan.
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan termasuk anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap triwulan.
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
10. Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket pekerjaan, dan/ atau jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan.
11. Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, apabila

BAB I

PENDAHULUAN

diperlukan.

12. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Anwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan.
13. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa.
15. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Kasatker.
16. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
17. Menandatangani pakta integritas.
18. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA.
19. Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan dinas).
20. Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/ jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola.
21. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang.
22. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satker, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun yang swakelola.
23. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya atas persetujuan Kasatker dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
24. Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan.
25. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker.
26. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L)

BAB I

PENDAHULUAN

tahun berikutnya.

Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatangani.
2. Bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan keluaran/ output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA.
3. Bertanggung jawab kepada Kasatker.

C. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran

Tugas :

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check –list kelengkapan berkas SPP, dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
2. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memeriksa ketersediaan PAGU anggaran untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas PAGU anggaran.
4. Memeriksa kebenaran atas hak tagih, dan
5. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator kinerja yang tercantum dalam DIPA.
6. Menerbitkan SPM dalam rangkap 6 dengan ketentuan
7. Menyusun Laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA
8. Memeriksa ketersediaan PAGU anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas PAGU anggaran.
9. Memeriksa kebenaran atas hak tagih.

Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan pengeluaran.
2. Bertanggung jawab kepada Kepala Satker OP.

BAB I

PENDAHULUAN

D. Bendahara Pengeluaran

Tugas :

1. Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan.
2. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.
3. Memeriksa kebenaran atas hak tagih
4. Memeriksa pencapaian tujuan dan / atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA
5. Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satker OP pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran
6. Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya
7. Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan MAK , DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran
8. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
9. Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara.
10. Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara
11. Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan meliputi kesesuaian atas persetujuan Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satker O&P SDA Sumatera VII untuk Belanja Barang (52), Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang,

BAB I

PENDAHULUAN

pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan asset, dan Belanja lain-lain (58), dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kpela Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas.

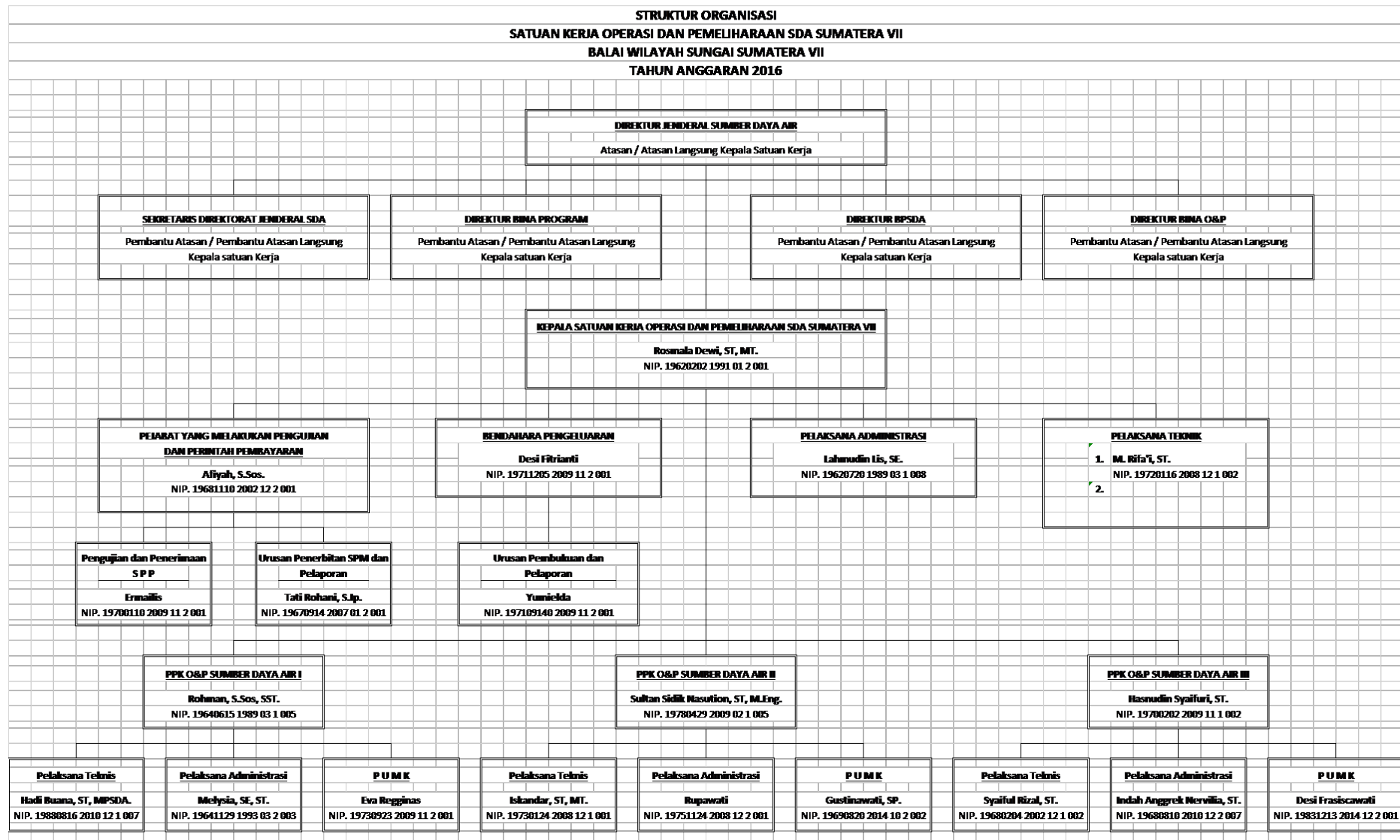
12. Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/ pejabat Yang ditunjuk apabila persyaratakan pembayaran tidak terpenuhi

Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan.
2. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara.
3. Bertanggung jawab kepada Kepala Satker OP

BAB I

PENDAHULUAN



Gambar. 1.1 Struktur Organisasi Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII

BAB I

PENDAHULUAN

1.4 Gambaran Wilayah Kerja

1.4.1 Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Muko-Muko, Lebong dan Kapahyang serta 1 (satu) kota, yaitu kota Bengkulu yang sekaligus merupakan ibu kota provinsi ini. Beberapa hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan di Bengkulu memiliki potensi untuk dikembangkan dan diolah dalam industri olahan, seperti minyak kelapa sawit, rotan, kayu lapis dan olahan untuk bahan furniture, crumb rubber, udang beku dan pengolahan ikan dalam kaleng. Daerah Bengkulu juga menghasilkan sayur-sayuran, seperti lombok, tomat, kacang kedelai, kacang hijau, kacang panjang, terong, kubis, sawi, wortel, lobak, dan buah-buahan seperti durian, mangga, pepaya, dan pisang.

Perkebunan di Bengkulu menghasilkan antara lain, kelapa sawit, karet, dan coklat yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan. Sementara kopi banyak terdapat di Rejang Lebong. Hasil komoditas perkebunan lainnya, seperti lada, cengkeh, enau, teh, tembakau, kemiri, kapuk dan pinang tersebar di seluruh wilayah Bengkulu. Potensi perikanan di daerah Bengkulu meliputi usaha perikanan darat, tambak, dan perikanan laut yang sampai sekarang belum dimanfaatkan secara optimal dan masih berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam hal pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Bengkulu juga memiliki obyek wisata yang beragam, baik wisata alam, budaya maupun sejarah. Wisata alamnya antara lain Bukit Kaba di Curup, Bukit Belerang Semaleko di Lebong Selatan, Bunga Raflesia Arnoldi di Taba Pananjung. Rekreasi pantainya antara lain pantai Panjang Nala di Gading Cempaka, pantai pasir putih Pulau Baai di Selebar, danau di Selebar, danau Tes di Lebong Selatan, cagar alam Pagar Gunung di Kepahyang, cagar alam Lubuk Tapi di Pino, dan sebagainya. Wisata budayanya antara lain kesenian Tabot, tarian rakyat Enggano, dan kerajinan kain Besurek. Wisata sejarahnya meliputi rumah peninggalan Bung Karno, Benteng Malborough, dan monumen Thomas Par di Teluk Segara. Sebagai tujuan investasi, provinsi ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya

BAB I

PENDAHULUAN

Bandara Fatmawati di Bengkulu dan Bandara Muko-Muko di Bengkulu serta memiliki Pelabuhan Linai Bintuhan dan Pelabuhan Malakoni Enggano.

Secara geografis Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan, yang luas wilayahnya mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi. Secara administrasi pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi dalam 10 kabupaten/kota. Posisi Kota Bengkulu menyebabkan daerah ini mempunyai lingkungan pantai yang berhadapan dengan gelombang kuat dan dapat menimbulkan erosi alami pantai atau abrasi pantai. ditinjau dari letak geografisnya terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan dan memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung sepanjang lebih kurang 567 kilometer. Berdasarkan keadaan alam dan letaknya, maka wilayah Provinsi Bengkulu mempunyai ketinggian dari permukaan laut yang berbeda-beda, Bagian Timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diselingi oleh daerah yang bergelombang.¹

Secara topografi, bentuk permukaan wilayah Kota Bengkulu relatif datar, sebagian besar wilayah berada pada kemiringan/kelerengan 0,15% yaitu seluas 14.224 Ha (98,42%) dan hanya sebagian kecil 1,58% yakni seluas 228 Ha dari wilayah Kota Bengkulu yang memiliki kelerengan 15-40%. Wilayah yang relatif datar terutama di wilayah pantai dengan kemiringan berkisar antara 0-10 meter di atas permukaan laut, sedangkan di bagian Timur memiliki ketinggian berkisar 25-50 meter di atas permukaan laut.

Batas-batas wilayah Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang 525 kilometer, terletak pada bagian Barat dan merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari Utara ke Selatan serta

1 Lihat www.bengkulukota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

diselang-selingi daerah yang bergelombang, sedangkan pada bagian Timur berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai kurang lebih 1.991.933 HA atau 19.919,33 KM terdiri dari 9 (sembilan) daerah Kabupaten/Kota meliputi :

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

NO	KABUPATEN / KOTA	LUAS WILAYAH (KM ²)
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	1,186.10
2	Kabupaten Rejang Lebong	1,639.98
3	Kabupaten Bengkulu Utara	4,324.60
4	Kabupaten Kaur	2,369.05
5	Kabupaten Seluma	2,400.44
6	Kabupaten Mukomuko	4,036.70
7	Kabupaten Lebong	1,921.82
8	Kabupaten Kepahiang	665.00
9	Kabupaten Bengkulu Tengah	1,223.94
10	Kota Bengkulu	151.70
Total		19,919.33

Sumber : <http://informasipedia.com/wilayah-indonesia/daftar-luas-kabupaten-kota-di-indonesia/794-daftar-luas-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu.html>

BAB I

PENDAHULUAN

Gambar. 1.2

Peta Provinsi Bengkulu



1.4.2 Wilayah Sungai Di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Menteri dan Perumahan Rakyat No. 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Permen PUPR no 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan, Kepmen PU no 405/KPTS/M/2012 tentang Pola Pengelolaan SDA WS Teramang – Muar, maka Wilayah Sungai (WS) Balai Wilayah Sungai Sumatera VII adalah Wilayah Sungai Teramang Muar 01.38.A2 yang terdiri atas 15 Daerah Aliran Sungai (DAS). Nama – nama Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1.2

Wilayah Sungai Administrasi BWS Sumatera VII

NO	KODE WILAYAH SUNGAI	NAMA WILAYAH SUNGAI	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI	PROVINSI
1	01.38.A2	Teramang Muar	DAS Manjuto	Bengkulu dan Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

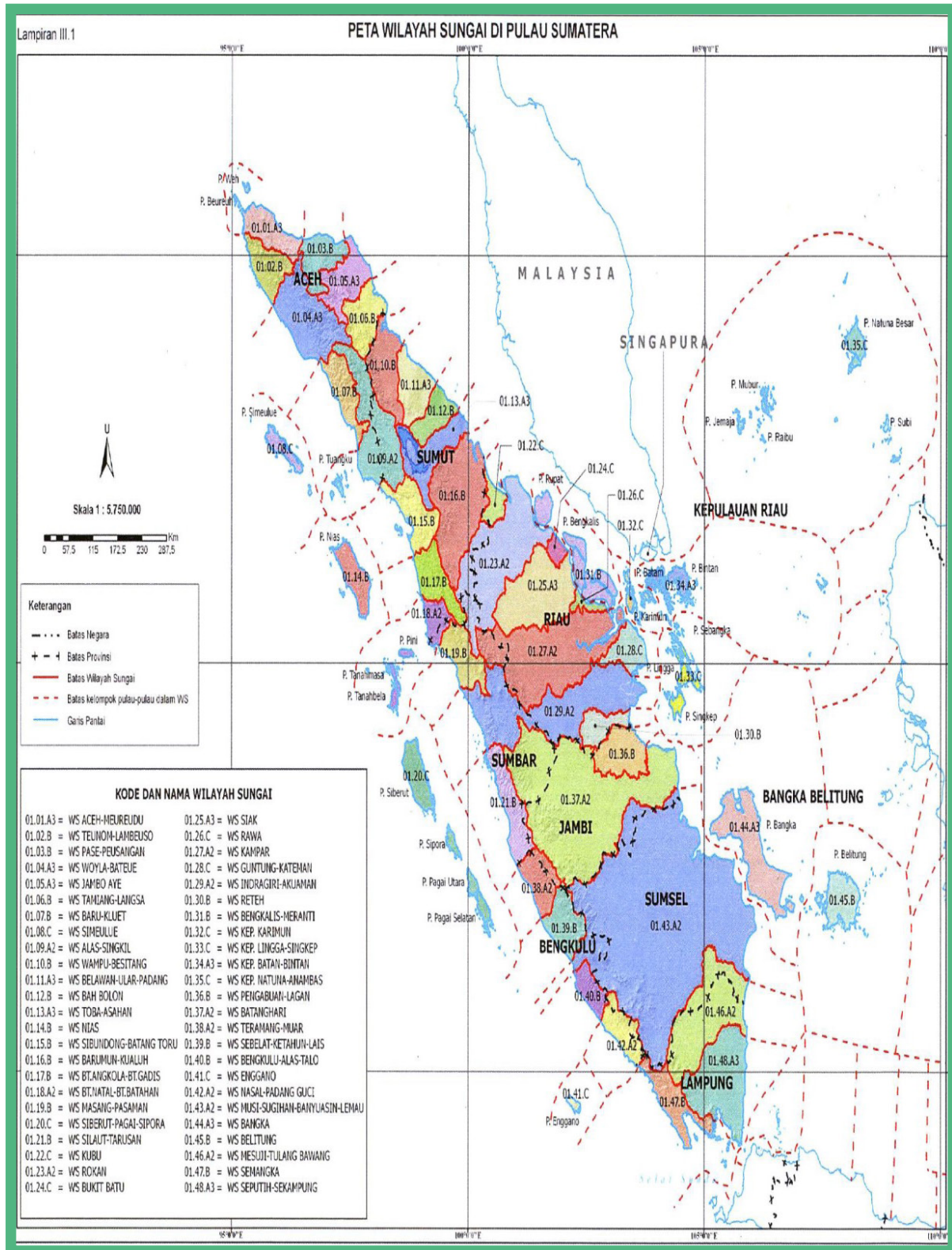
			DAS Selagan	
			DAS Lagan	
			DAS Dikit	
			DAS Pelatun Gedang	
			DAS Bakal Kecil	
			DAS Bantal	
			DAS Bakal Gedang	
			DAS Pinang	
			DAS Seblat	
			DAS Teramang	
			DAS Retak	
			DAS Muar	
			DAS Buluh	
			DAS Rami	

NO	KODE WILAYAH SUNGAI	NAMA WILAYAH SUNGAI	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI	PROVINSI
1	01.38.A2	Teramang Muar	DAS Manjuto	Bengkulu dan Jambi
			DAS Selagan	
			DAS Lagan	
			DAS Dikit	
			DAS Pelatun Gedang	
			DAS Bakal Kecil	
			DAS Bantal	
			DAS Bakal Gedang	
			DAS Pinang	
			DAS Seblat	
			DAS Teramang	
			DAS Retak	
			DAS Muar	
			DAS Buluh	
			DAS Rami	

BAB I

PENDAHULUAN

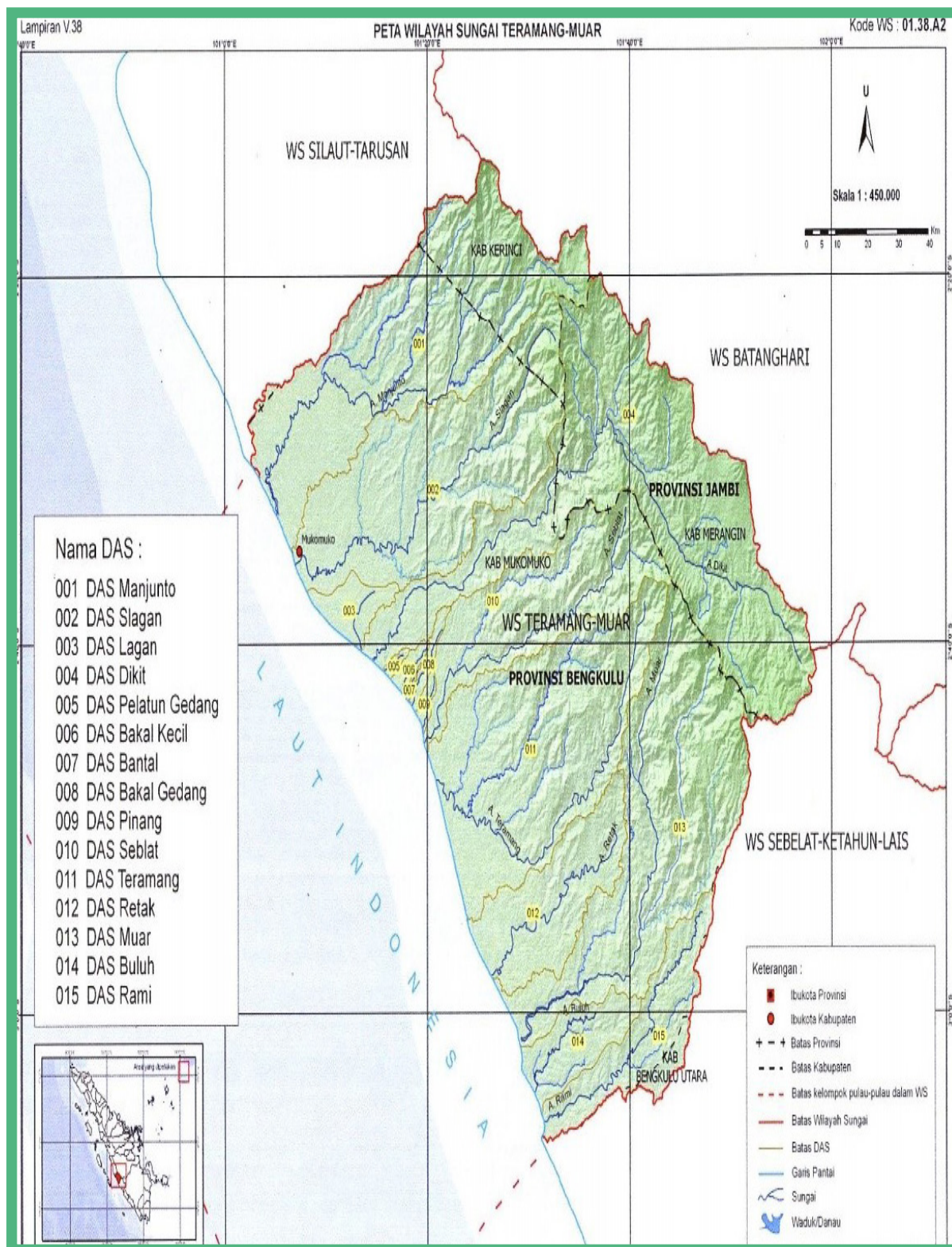
Gambar. 1.3
Peta Wilayah Sungai
Balai Wilayah Sungai Sumatera VII



BAB I

PENDAHULUAN

Gambar. 1.4
Peta Wilayah Sungai
Teramang Muar 01.38.A2



BAB I

PENDAHULUAN

Berikut adalah daftar paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII pada tahun 2016:

1. Revitalisasi Peralatan Pos Hidrologi
2. Audit Teknis Kinerja Air Baku
3. Audit Teknis Kinerja Sarana Pengaman Pantai
4. O & P Prasarana Pengaman Pantai Linau
5. O & P Prasarana Pengaman Pantai Punggur
6. O & P Prasarana Pengaman Pantai Panjang
7. O & P Prasarana Pengaman Pantai Lais-Serangai
8. O & P Prasarana Pengaman Pantai Pasar Bawah Manna
9. Audit Teknis Kinerja Pengendali banjir
10. O & P Prasarana Normalisasi Drainase Air Bengkulu
11. O & P Prasarana Pengendali Banjir Air Manjuto
12. O & P Prasarana Pengendali Banjir Air Ketahun
13. O & P Prasarana Pengendali Banjir Air Nipis
14. O & P Prasarana Pengendali Banjir Air Selagan
15. Audit Teknis Kinerja Danau
16. Audit Teknis Kinerja Irigasi
17. O & P Prasarana Pengaman Tebing Bendung Air Seluma

BAB I

PENDAHULUAN

Tabel. 1.3

Program Kerja Tahunan Anggaran 2016
Satker OP SDA Sumatera VII Provinsi Bengkulu

SATKER	PROGRAM KEGIATAN	
1	2	
SATKER OP SDA SUMATERA VII	Layanan Teknis Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu	DATA HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR YANG DIKELOLA
		Revitalisasi Peralatan Pos Hidrologi
	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA	UNIT AIR BAKU YANG DIOPERASIKAN DAN DIPELIHARA
		Audit Teknis Kinerja Air Baku
		Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Alam Tanah Longsor IKK Sindang Kelingi - Binduriang - Padang Ulak Tanding, Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong
		BANGUNAN PENGAMAN PANTAI YANG DIPELIHARA
		Audit Teknis Kinerja Sarana Pengaman Pantai
		O & P Prasarana Pengaman Pantai Linau
		O&P Prasarana Pengaman Pantai Punggur
		O&P Prasarana Pengaman Pantai Panjang
		O&P Prasarana Pengaman Pantai Lais-Serangai
		O & P Prasarana Pengaman Pantai Pasar Bawah Manna
		SUNGAI YANG DIPELIHARA
		Audit Teknis Kinerja Pengendali Banjir
		O & P Prasarana Normalisasi Drainase Air Bengkulu
		O & P Prasarana Pengendali Banjir Air Manjuto
		O & P Prasarana Pengendali Banjir Air Ketahun
		O & P Prasarana Pengendali Banjir Air Nipis
		O & P Prasarana Pengendali Banjir Air Selagan
		DANAU YANG DIPELIHARA
		Audit Teknis Kinerja Danau
		JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN PUSAT YANG DIOPERASIKAN DAN DIPELIHARA
		Audit Teknis Kinerja Irigasi
		BENDUNG IRIGASI KEWENANGAN PUSAT YANG DIOPERASIKAN DAN DIPELIHARA
		O&P Prasarana Pengaman Tebing Bendung Air Seluma

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 HAMBATAN DAN TANTANGAN / ISU STRATEGIS

A. ISU STRATEGIS

Balai Wilayah Sungai Sumatera VII menuangkan isi strategis dalam Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai. Berikut adalah isu strategis yang tertuang dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai :

a. Isu Strategis Nasional

1. Penyediaan Air Bersih

Target Nasional untuk pemenuhan air bersih pada tahun 2019 adalah 100 %. Untuk melayani air minum saat ini baru terpasang 74,5 l/dtk, atau baru sebesar 10,45% dari total kebutuhan sebesar 741,70 l/dtk.

2. Ketahanan Pangan

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengembangan daerah irigasi yang berada di kabupaten Mukomuko, yang meliputi 29 Daerah Irigasi dengan skala irigasi kecil/ sederhana sampai besar. Luas sawah saat ini (fungsional) 12.332 Ha, Luas Daerah Irigasi Potensial 10.097 Ha, Luas Panen saat ini adalah 19.064 Ha, produksi sebesar 85.940 ton/th.

3. Ketersediaan Energi

Dalam rangka mendukung kebutuhan energi nasional, memungkinkan dikembangkannya potensi tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik :

1. Kab. Mukomuko terdapat potensi energi air yang dapat dikembangkan menjadi PLTMH : Air Rami (77,62 KW), Air Ipuh (115,34 KW), Air Teramang (77,62 KW), Air Pandan (10 KW), Air Selagan (441,98 KW), Air Manjuto 234 KW).
2. Kab. Mukomuko, terdapat potensi energi air yang dapat dikembangkan menjadi PLTA seperti rencana Bendungan Air dikit (8,21 MW) dan rencana Bendungan Muar (16,69 MW).

b. Isu Strategis Lokal

1. Abrasi di pesisir barat Kab. Mukomuko, mengancam jalan negara (lintas barat Sumatera).
2. Banjir seperti di Air Manjuto dan Air Selagan
3. Pencemaran sungai (Air Dikit, Air Manjuto, Air Selagan, dan Air Muar)

BAB I

PENDAHULUAN

Hilir

4. Alih fungsi lahan (Irigasi menjadi perkebunan kelapa sawit)
5. Kerusakan kondisi TNKS yang disebabkan oleh Perambahan hutan (illegal Logging) dan pembuatan jalan pada lokasi bentang alam yang menyebabkan kondisi erosi dan sedimentasi yang tinggi

Berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi Nasional, isu-isu Nasional dan Lokal serta status WS. Teramang-Muar sebagai wilayah sungai lintas provinsi, maka strategi kebijakan oprasional terpilih dilakukan oleh TKPSDA adalah **Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tinggi** dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional diatas 6%. SK pembentukan TKPSDA Teramang Muar nomor 400/KPTS/M/2010 tanggal 5 Juli 2010 berlaku selama 5 tahun.

Pemilihan strategi terpilih oleh TKPSDA Berita Acara momor 72/BA/TKPSDA-TM/BWS.SVII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

B. HAMBATAN DAN TANTANGAN

Pengelolaan Pembangunan Nasional serta keberhasilan penanggulangan kemiskinan didorong oleh pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam upaya mendukung kondisi tersebut di atas, Satker OP SDA Sumatera VII Provinsi Bengkulu melalui tugas dan fungsi utamanya yaitu melaksanakan penyediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air dalam hal Layanan Teknis Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu program kegiatan yaitu Data Hidrologi dan Kualitas Air Yang Dikelola, Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA program kegiatan meliputi Unit Air Baku yang dioperasikan dan dipeliha, Bangunan Pengaman Pantai yang dipelihara, Sungai yang dipelihara, Danau yang dipelihara, Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara Bendung Irigasi Kewenangnan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara. Satker OP SDA Sumatera VII yang merupakan kepanjangan tangan atas pelaksanaan tugas kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Provinsi Bengkulu, diharapkan dalam proses pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum dalam pengelolaan serta pemerataan sumber daya air akan dapat dirasakan pembangunannya di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

BAB I

PENDAHULUAN

Satker OP SDA Sumatera VII yang merupakan kepanjangan tangan atas pelaksanaan tugas kewenangan Balai wilayah Sungai Sumatera VII sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Provinsi Bengkulu, telah melaksanakan program-program kegiatan berdasarkan Renstra Strategis 2015-2019. Evaluasi atas pelaksanaan program-program kegiatan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk pembenahan dan peningkatan kinerja dilingkungan Satker OP SDA Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang meliputi pembangunan fisik, Selain itu juga dilakukan peningkatan non fisik seperti peraturan dan kebijakan, konservasi lingkungan yang meliputi pengelolaan sumber daya air, upaya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang selaras dengan lingkungan. Tantangan yang dihadapi Satker OP SDA Sumatera VII Provinsi Bengkulu tidak hanya datang dari unsur eksternal tetapi juga datang dari unsur internal.

- Tantangan Internal

Setiap tahunnya Satker OP SDA Sumatera VII selalu dihadapkan oleh tantangan internal yang tidak sama, selalu ada tantangan yang datang dan berkembang yang menuntut upaya lebih dalam penyelesaiannya namun dapat mendukung kinerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII. Hal ini terjadi Karena adanya perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi dalam melaksanakan pekerjaan sehingga perkembangan tersebut mempengaruhi pola pikir, daya kreatif dan tuntutan bertambahnya wawasan. Tantangan internal (dari dalam) yang dihadapi Satker OP SDA Sumatera VII adalah sebagai berikut :

- Kurangnya pengadaan alat-alat yang berteknologi tinggi hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan akan manfaat dan penggunaan teknologi itu sendiri sehingga masih dianggap bukan bagian prioritas yang harus diutamakan.
- Sumber daya manusia yang banyak secara kuantitas namun masih sulit untuk diarahkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mau tidak mau hal ini sedikit menghambat dalam menghasilkan ide-ide kreatif untuk mengelola semua pekerjaan baik teknis maupun manajerial Satker OP SDA di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
- Perkembangan terus berkembang namun pemahaman ilmu pada masing-masing bidang belum begitu penting sehingga penyelesaian pekerjaan

BAB I

PENDAHULUAN

masih menggunakan cara lama padahal dengan terus meningkatkan pengetahuan sesuai bidangnya maka pekerjaan bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih baik dan lebih maju.

- Teknologi yang semakin maju namun hanya sedikit sumber daya manusia yang mau mempelajari dan terus mengikuti perkembangan teknologi ini guna menaikkan kinerja pekerjaan dan mewujudkan pekerjaan yang lebih efektif, efisien dan berkualitas.

- Tantangan Eksternal

Pelaksanaan pekerjaan di satker OP SDA Sumatera VII tidak lepas dari pemantauan dari pihak luar (eksteral). Pihak eksteral bisa menjadi hal positif apabila bisa bersanding dengan baik dan bisa menjadi hal negative bagi Satker OP SDA di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII. Namun hal ini tidak dapat dihindarkan Karena setiap pelaksanaan pekerjaan harus melibatkan orang luar seperti masyarakat sekitar lokasi pekerjaan, pihak LSM yang mengawasi jalannya pekerjaan. Tantangan eksternal yang dihadapi Satker OP SDA Sumatera VII adalah sebagai berikut :

- Kondisi Bengkulu yang secara topografi mempunyai kemiringan/kelerengan 0.15 – 1.6 persen, maka hal ini tidak bisa dipungkiri menjadi factor penghambat pelaksanaan pekerjaan.
- Adanya pihak lain yang masih ikut campur sehingga beberapa pekerjaan menjadi mundur dikarenakan lamanya waktu untuk bernegosiasi ataupun mencari solusi yang terbaik.
- Kondisi masyarakat yang masih gampang di pengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga cukup menyulitkan kelancaran pekerjaan.
- LSM yang badan hukumnya masih belum legal terkadang menjadi masalah tersendiri Karena banyaknya laporan yang tidak bertanggung jawab justru dari mereka.
- Masih kurangnya koordinasi, maka hal ini berdampak pada belum lengkapnya data – data terkait guna mendukung tercapainya pelaksanaan pekerjaan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Direktorat Jenderal SDA) merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Bidang Sumber Daya Air. Renstra juga merupakan siklus perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga penyusunan Renstra juga harus berlandaskan pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda dan sasaran pembangunan nasional mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah sesuai dengan salah satu rumusan misinya, yaitu Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestic dalam rangka kemandirian ekonomi.

Guna mencapai misi tersebut, Direktorat Jenderal SDA menetapkan 3 (tiga) tujuan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian PUPR untuk pencapaian mencapai sasaran dan tujuan Kementerian PUPR serta sasaran – sasaran Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, yaitu :

- a. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi guna menggerakkan sektor strategis ekonomi domestic dalam rangka kemandirian ekonomi.
- b. Menyelenggarakan keterpaduan tatakelola pengelolaan SDA untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestic dalam rangka kemandirian ekonomi.
- c. Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal SDA yang meliputi sumber daya manusia sarana prasarana pendukung pengendalian dan pengawasan serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang SDA yang efektif efisien transparan dan akuntabel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan pekerjaan dilingkungan Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber daya Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu berdasarkan Renstra 2015-2019 telah melakukan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan dengan sumber daya air, antara lain Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air, Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air dan Meningkatnya kinerja layanan irigasi. Tantangan yang dihadapi Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII bukan hanya datang dari luar (eksternal) tetapi juga datang dari dalam (internal) terkait dengan administrasi dan teknis pekerjaan. Namun lewat kerjasama tim yang baik, segala tantangan dapat terselesaikan. Seluruh personil di dalam organisasi Satker OP SDA Sumatera VII, para penyedia jasa konstruksi maupun konsultan pengawas telah berupaya menunjukkan kinerja maksimalnya agar pembangunan fisik yang ditargetkan dapat terselesaikan. Evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk pembenahan dan peningkatan kinerja dilingkungan Satker OP SDA Sumatera VII dengan melakukan pembangunan fisik, pembenahan sarana/prasarana baik bidang Sungai dan Pantai serta Sarana Prasarana Danau dan Bendung. Seperti yang telah disampaikan diatas, tantangan yang dihadapi Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII bukan hanya datang dari luar (eksternal) tetapi juga datang dari dalam (internal) terkait dengan administrasi dan teknis pekerjaan.

Tantangan internal terdiri atas tantangan administrasi dan tantangan teknis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tantangan administrasi

- » Adanya perubahan Nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga menyebabkan terlambatnya pencairan dana DIPA Tahun Anggaran 2016.
- » Terlambatnya penanda tanganan Kontrak yang disebabkan karena lamanya proses penetapan pejabat dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
- » Adanya pergantian pejabat Satker ,yang mana satker semula Bapak Hery Mulyana, BE, S. Sos menjadi Ibu Rosmala Dewi, ST, MT.
- » Adanya pergantian pajabat pembuat komitmen (PPK), yang mana PPK semula ibu Rosmala Dewi, ST, MT menjadi Bapak Sultan Sidiq Nasution, ST, MT.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2. Tantangan Teknis

- » Dalam Pekerjaan fisik pelaksanaan OP, Pembinaan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana harus mampu mensiasati semua keadaan iklim dan cuaca dimana ketika cuaca panas, progres pekerjaan harus sangat dimaksimalkan dan ketika cuaca hujan pekerjaan tetap dilaksanakan dengan mengkondisikan keadaan agar progres fisik tetap naik walaupun tidak sebaik ketika cuaca panas.

Tantangan eksternal terdiri atas tantangan administrasi dan tantangan teknis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tantangan Administrasi

- » Kurangnya pemahaman mengenai kewenangan pengelolaan air permukaan oleh pelaku dunia industri dan pemerintah daerah dalam hal meminta rekomendasi teknis, dimana seharusnya mereka meminta ke Balai Wilayah Sungai Sumatera VII tetapi justru meminta ke pemerintah daerah setempat

2. Tantangan Teknis

- » Masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan di sekitar bangunan operasai dan pemeliharaan OP SDA sehingga menyebabkan saluran air meluap dan banjir, coret mencoret di sekitar bangunan yang menyebabkan bangunan menjadi rusak dan kotor.

Menghadapi berbagai tantangan pembangunan dari unsur internal maupun eksternal, Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII mampu melaksanakan semua paket pekerjaan yang tercantum dalam DIPA Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII Tahun Anggaran 2016 dengan hasil yang “memuaskan”. Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan dan membenahi semua kelemahan yang ada di dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan administrasi.

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 sebagaimana tercantum pada Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 adalah :

“ Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Guna mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi, yang harus dapat menjembatani penjabaran visi ke dalam tujuan. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 adalah :

“ Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi “

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal SDA

Untuk mewujudkan visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut ke dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Dari visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dirumuskan tujuan – tujuan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2015 – 2019 yang merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian PUPR untuk pencapaian mencapai sasaran dan tujuan Kementerian PUPR serta sasaran – sasaran Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2015-2019 meliputi :

- a. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor strategis ekonomi dalam rangka kemandirian ekonomi.
- b. Menyelenggarakan keterpaduan tatakelola pengelolaan SDA untuk mengurangi disparitis pembangunan wilayah guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
- c. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal SDA meliputi sumber daya manusia sarana prasarana pendukung pengendalian dan pengawasan serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air yang efektif efisien transparan dan akuntabel.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 4 (empat) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan.
2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energy.
3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya asing.
4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.

Berdasarkan hal tersebut, sasaran strategis Direktorat Jenderal SDA adalah “Mewujudkan kehandalan infrastruktur sumber daya air dalam mewujudkan kedaulatan pangan, ketahan air, dan kedaulatan energi.”

Kementerian PUPR memiliki 4 (empat) sasaran strategis ,yang mana Direktorat Jenderal SDA mendukung perwujudan sasaran strategis ke-2 yaitu : “ Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energy”

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Direktur Jenderal SDA menetapkan sasaran program yang menggambarkan kinerja Direktorat Jenderal SDA yang akan dicapai dalam rangka pencapaian sasaran strategis, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja layanan irigasi
2. Meningkatnya layanan sasaran dan prasarana penyedia air baku
3. Meningkatnya kapasitas tampung sumber – sumber air
4. Meningkatnya Potensi energi dari sumber – sumber air
5. Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak
6. Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air
7. Meningkatnya keterpaduan tata kelola sumber daya air

Operasionalisasi strategi Direktorat Jenderal SDA tersebut dilaksanakan dalam sebuah program yaitu Program Pengelolaan SDA yang meliputi Kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa dan tambak
- b. Pengendalian banjir,lahar gunung berapi dan pengaman pantai
- c. Peningkatan tata kelola pengelolaan SDA terpadu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- d. Pengelolaan bendungan, embung dan bangunan penampungan air lainnya
- e. Penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku
- f. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SDA

Adapun kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- Layanan teknis OP sasaran prasarana SDA melalui pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Tampungan air yang dioperasikan dan dipelihara meliputi bendungan embung dan bangunan penampung air lainnya melalui pelaksanaan OP monitoring dan evaluasi serta pembinaan tenaga OP bendungan embung dan bangunan penampung air lainnya
- Sarana dan prasarana pengendalian daya rusak meliputi tanggul tebing banjir, kanal banjir, pengendalian lahar gunung berapi, bangunan pengaman pantai melalui pelaksanaan OP monitoring dan evaluasi serta pembinaan tenaga OP sarana dan prasarana pengendalian rusak.
- Sungai yang dipelihara melalui pelaksanaan OP monitoring dan evaluasi serta pembinaan tenaga OP
- Danau yang dipelihara melalui pelaksanaan OP monitoring dan evaluasi serta pembinaan tenaga OP
- Kawasan rawa yang dipelihara melalui pelaksanaan OP monitoring dan evaluasi serta pembinaan tenaga OP
- Peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan melalui pemetaan dan penetapan kawasan rawan bencana.

Dalam rangka pencapaian sasaran – sasaran program tersebut dibutuhkan upaya – upaya internal, seperti :

1. Meningkatkan SDM yang berkompeten dan berintegritas.
2. Meningkatkan budaya kerja berkinerja tinggi dan berintegritas.
3. Meningkatkan pengelolaan regulasi.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT).
5. Meningkatkan layanan dukungan manajemen.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Menurut Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pemimpin instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja.

Penetapan Perjanjian Kinerja Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Penetapan perjanjian kinerja tahun 2016 ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penetapan kinerja Satker OP SDA Sumatera VII tahun 2016 berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansi tidak terdapat perbedaan pada keduanya. Substansi yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja memuat sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan dari dokumen yang ditetapkan oleh Menteri PUPR guna mewujudkan capaian sasaran strategis. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII pada tabel 2.1 dibawah ini :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016												
SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VII												
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT												
No	Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Awal				Target Revisi					
			Target Output		Target Outcome		Target Output		Target Outcome			
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1) Meningkatnya Ketahanan Air Nasional												
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	1 Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku		Km				Km				
				Buah		m ³ /detik		Buah		m ³ /detik		
				Titik				Titik				
		2 Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula		Km				Km				
				Buah		m ³ /detik		Buah		m ³ /detik		
				Titik				Titik				
		3 Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	0	Km			0	Km				
			5	Buah	0-30	m ³ /detik	5	Buah	0-30	m ³ /detik		
				Titik				Titik				
2	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air	1 Peningkatan kapasitas tampung sumber air		Bendungan		juta m ³		Bendungan		juta m ³		
				Buah				Buah				
				Titik				Titik				
		2 Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air		Bendungan		juta m ³		Bendungan		juta m ³		
				Buah				Buah				
				Danau				Danau				
		3 Terjaganya kapasitas tampung sumber air		Bendungan				Bendungan				
			9	Danau	22-97	juta m ³	9	Danau	22-97	juta m ³		
				Mata air				Mata air				
3	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air	1 Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	54.00	Km		910	Ha	54.00	Km		910	Ha
		Buah				Buah						
4	Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	1 Peningkatan indeks RBO (indeks)		Indeks		Indeks		Indeks		Indeks		Indeks
5	Meningkatnya upaya konservasi sumber air	1 Peningkatan persentase kawasan/lokasi yang di konservasi pada kawasan prioritas		%		%		%		%		%
2) Meningkatnya Dukungan untuk Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Energi												
6	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	1 Peningkatan layanan jaringan irigasi		Km		Ha	-	Km		0.00	Ha	
				Bendung				Bendung				
		2 Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi		Km		Ha		Km		Ha		
				Bendung				Bendung				
		3 Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi		Km		41.116	Ha		Km		41.116	Ha
			7	Bendung				7	Bendung			
7	Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air	1 Peningkatan potensi energi sumber air		Mw		Mw		Mw		Mw		Mw

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja 2016 Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4(empat) sasaran program dan 4(empat) indikator kinerja sebagai acuan penilaian kinerja masing-masing program dengan rincian sebagai berikut :

- a. Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku
 - Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku
- b. Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air
 - Terjaganya kapasitas tampung sumber air
- c. Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air
 - Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air
- d. Meningkatnya kinerja layanan irigasi
 - Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi

2.3 METODE PENGUKURAN

2.3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang kewajiban menyusun renstra dan laporan kinerja dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Selain itu menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta Permen & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut, dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Penilaian tingkat capaian kinerja Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

indikator kinerja program, diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, seperti dalam tabel 2.2 berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Kategori Warna
1	2	3	4	
1.	AA	>85-100	Memuaskan	
2.	AA	>75-85	Sangat Baik	
3.	B	>65-75	Baik	
4.	CC	>50-65	Cukup	
5.	C	>30-50	Kurang	
6.	D	>0-30	Sangat Kurang	

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian

Pengukuran Kinerja tahun 2016 merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja 2016 dalam rangka pelaksanaan DIPA APBN tahun 2016.

2.3.2 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis

Secara umum Satker OP SDA Sumatera VII telah berhasil melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2015-2019. Selama tahun 2015, langkah-langkah yang dilakukan guna perbaikan capaian kinerja Satker OP SDA Sumatera VII antara lain :

1. Capaian Kinerja

- Melakukan percepatan pencapaian pekerjaan dari waktu pelaksanaan yang ditentukan di dalam kontrak. Hal ini dibuktikan pada Indikator kinerja bangun pengaman pantai yang dipelihara yaitu pada paket pekerjaan O&P Prasarana Pengaman Pantai Lais – Serangai dimana proyek tersebut telah selesai sebelum waktu pelaksanaan kontrak.
- Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan di Satker OP SDA Sumatera VII sehingga data yang dibutuhkan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

lebih cepat didapatkan dan tepat waktu serta tepat mutu.

- Penyempurnaan pelaporan dengan menyajikan informasi yang lebih lengkap dan akurat kepada para pemangku kepentingan di Satker OP SDA Sumatera VII.
- Melakukan percepatan penyerapan di triwulan kedua dan ketiga dan cepat dalam menanggapi pembangunan fisik yang berjalan lambat.
- Penyempurnaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan.

2. Sistem Manajemen Kerja

- Diterbitkan SK Balai Wilayah Sungai Sumatera VII No. 1/KPTS/BWS-SVII/2015 tanggal 1 Januari 2016 mengenai pelaporan akuntabilitas kinerja pada masing-masing satker di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII termasuk Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
- Pelaporan pencapaian anggaran, output, kegiatan, indikator kinerja Utama (IKU) yang komprehensif secara triwulanan kepada Kepala Satker OP SDA Sumatera VII yang dimulai sejak triwulan kedua, sebagai upaya evaluasi dini atas kinerja Satker OP SDA Sumatera VII.
- Pembenahan terhadap kinerja individual yang terlibat dalam tim pelaporan e-Monitoring Satker OP SDA Sumatera VII.

Penilaian kinerja yang diperoleh Satker OP SDA Sumatera VII pada tahun 2016 dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu triwulan I (pertama), triwulan II (kedua), triwulan III (ketiga) dan triwulan IV (keempat). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Satker OPSDA Sumatera VII pada tahun 2016 ini memiliki 62 pegawai sebagai sumber daya manusia yang akan digunakan sebagai penggerak kegiatan yang ada di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII. Sumber Daya Manusia ini kemudian dimanfaatkan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas setiap kegiatan yang ada di BWS Sumatera VII. Hal ini kemudian berarti bahwa harus ada peningkatan kualitas kinerja setiap pegawai, sejauh ini kinerja yang dihasilkan oleh sumber daya manusia di lingkungan Satker OPSDA belum maksimal bahkan masih jauh dari target, sehingga harus dilakukan oleh BWS Sumatera VII dalam meningkatkan kinerja pegawai termasuk di lingkungan Satker OPSDA antara lain :

1. Memberikan kesempatan pegawai untuk menghasilkan ide-ide kreatif yang dapat menunjang kinerja pekerjaan
2. Memberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, diutamakan yang sudah PNS
3. Aktif mengadakan sosialisasi yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia
4. Aktif mengirim pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis

Satker OPSDA Sumatera VII Provinsi Bengkulu didukung oleh pegawai sebanyak 62 pegawai dengan latar belakang Pendidikan teknik dan non teknik. Berdasarkan data dari Sub Bagian Kepegawaian Balai Wilayah Sungai Sumatera VII tahun 2016, kategori pegawai Satker OPSDA Sumatera VII berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 44 pegawai laki-laki 18 pegawai wanita. Kategori pegawai Satker OPSDA Sumatera VII berdasarkan status kepegawaian terdiri dari pegawai berstatus PNS Pusat sebanyak 45 orang atau 50% orang dari total pegawai, pegawai berstatus PNS Daerah yang diperbantukan di Satker OPSDA Sumatera VII sebanyak 5 orang atau 5 % dari total pegawai, pegawai berstatus CPNS Pusat sebanyak 4 orang atau 4 % dari total pegawai dan pegawai berstatus Non PNS sebanyak 8 orang atau 10 % dari total pegawai.

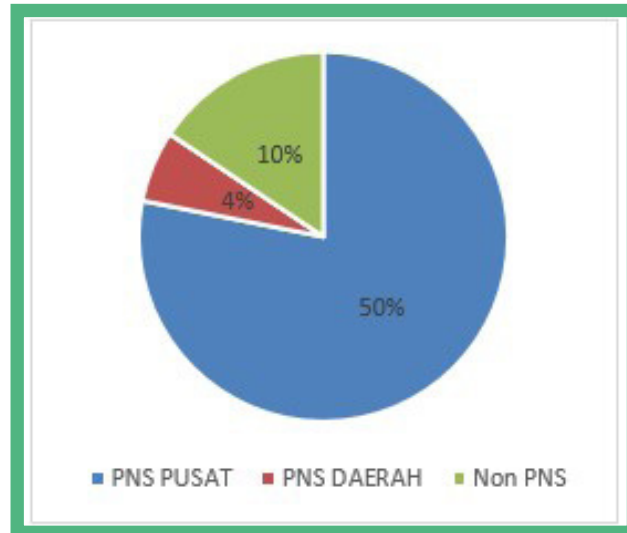
BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Gambar 3.1

Pegawai Satker OP SDA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Berdasarkan Status Kepegawaian



Kategori pegawai Satker OP SDA Sumatera VII Bengkulu tahun 2016 berdasarkan latar belakang Pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Umum (SMU) berjumlah 30 Orang, terdiri dari :
 - a. PNS Pusat berjumlah 26 orang
 - b. PNS Daerah berjumlah 1 orang
 - c. Non PNS berjumlah 3 orang
2. Sekolah Paket C berjumlah 1 orang
3. Sarjana (S1) berjumlah 24 orang, terdiri dari :
 - a. PNS Pusat berjumlah 18 orang
 - b. PNS Daerah berjumlah 3 orang
 - c. Non PNS berjumlah 3 orang
4. Magister (S.2) berjumlah 5 orang
 - a. PNS Pusat berjumlah 4 orang
 - b. PNS Daerah berjumlah 1 orang
5. Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1 orang

Satker OPSDA Sumatera VII memiliki sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas namun belum memadai secara kualitas, hal ini mengakibatkan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidang tertentu, oleh Karena itu pengembangan sumber daya manusia pada akhirnya menjadi periotas penting Karena

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

kinerja sumber daya sangat mempengaruhi hasil akhir kinerja pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satker OPSDA Sumatera VII. Satker OPSDA dalam ruang lingkup Balai Wilayah Sungai Sumatera VII sebagai unit kerja yang ditugaskan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus segera melakukan pengkaderan terhadap pemimpin masa depan yang memenuhi kualifikasi baik teknis maupun majerial sehingga ketika terjadi pergantian posisi jabatan sudah tersedia pengganti yang sangat layak dan berprestasi.

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana yang telah tersedia di Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan semua kegiatan yang berlangsung dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai yang ada di Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII. Dengan adanya sarana dan Prasaranan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai Karena pekerjaan yang dilakukan ditunjang dengan fasilitasi yang mendukung untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien.

Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII yang mana salah satu bagian pendukung kinerja dari Balai Wilayah Sungai Sumatera VII mempunyai asset tetap dengan nilai Rp. 2.049.602.930.738,- per Juni 2016. Asset tetap yang digunakan dalam kegiatan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka pencapaian kegiatan. Asset tetap Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Akun Neraca	Saldo per 30 Juni 2016	
		Kuantitas	Nilai
1.	Tanah	258.120.514	58.730.404.760
2.	Peralatan dan Mesin	1.067	13.325.849.947
3.	Gedung dan Bangunan	192	28.567.531.460
4.	Jalan dan Jembatan	516.409	112.413.300.241
5.	Irigasi	6.405	2861.473.741.674
6.	Jaringan	8	69.472.565.260
7.	Aset Tetap Dalam Renovasi	2	1.174.129.562
8.	Aset Tetap Lainnya	43	15.490.541.600
9.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	2.2280	169.911.026.892
TOTAL			3.328.897.720.896

Tabel 3.1 Aset BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera VII

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

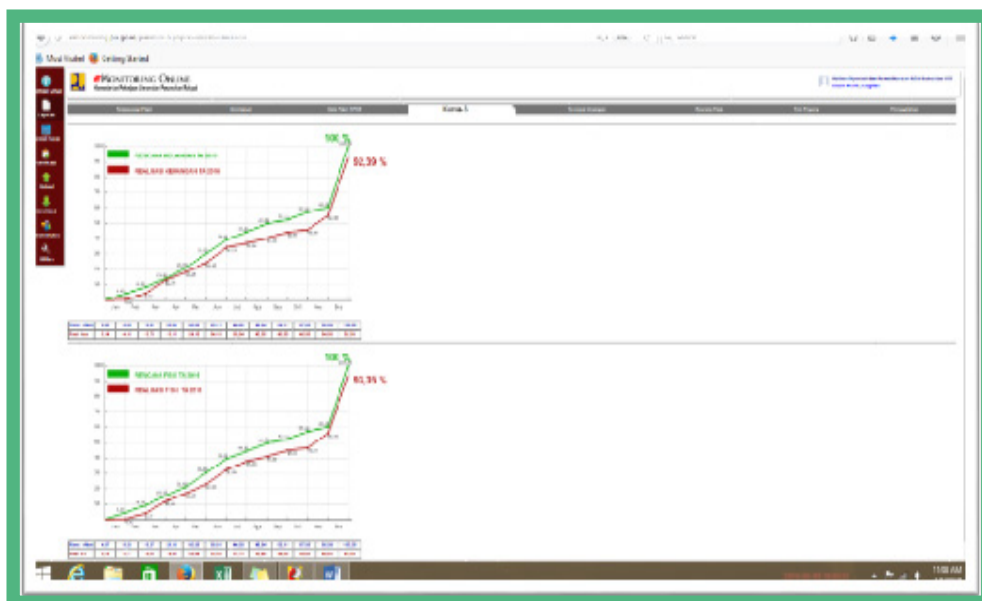
3.2.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan

Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII memanfaatkan teknologi informasi yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah berfungsi sebagai sarana dalam mendukung dan meningkatkan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan, diantaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelelangan/tender secara elektronik (e-Procurement) dan Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memiliki perangkat server dan aplikasi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisiensi.

» Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Secara Elektronik (e-Monitoring)

Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII menggunakan sistem e-Monitoring yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pelaporan realisasi keuangan dan progress fisik. Data yang dilaporkan ke sistem e-Monitoring adalah data yang akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Data ini kemudian digunakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk mengevaluasi perkembangan kelancaran pekerjaan di Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII sepanjang tahun berjalan.

Sistem e-Monitoring memudahkan memudahkan pimpinan baik dari Kepala Satker kepada Kepala Balai maupun dari Kepala Balai kepada Dirjen SDA maupun Menteri PUPR.



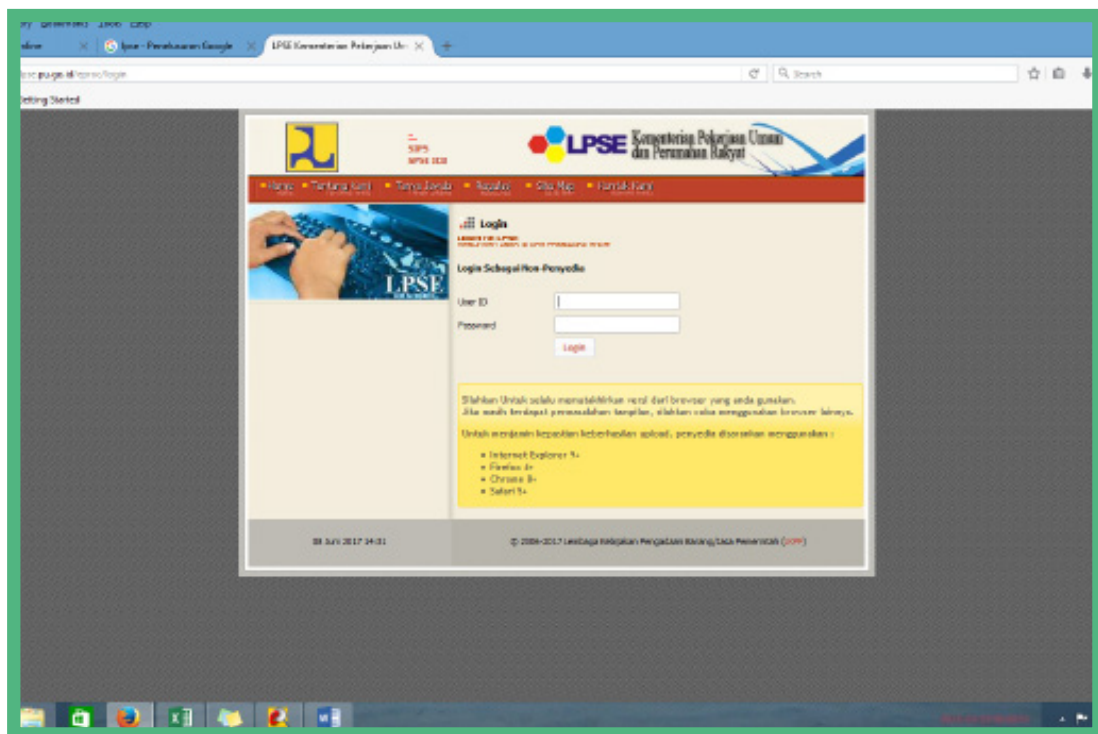
Gambar 3.2 Sistem e-Monitoring Kementerian PUPR

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

» Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam pasal 108 disebutkan K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. Maka berdasarkan ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan point utama sistem e-Procurement yang kemudian juga digunakan oleh Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII dalam melaksanakan pengadaan lelang yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlah paket Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII 17 paket dengan nilai 8.481 milyar rupiah.



Gambar 3.3 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian PUPR

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

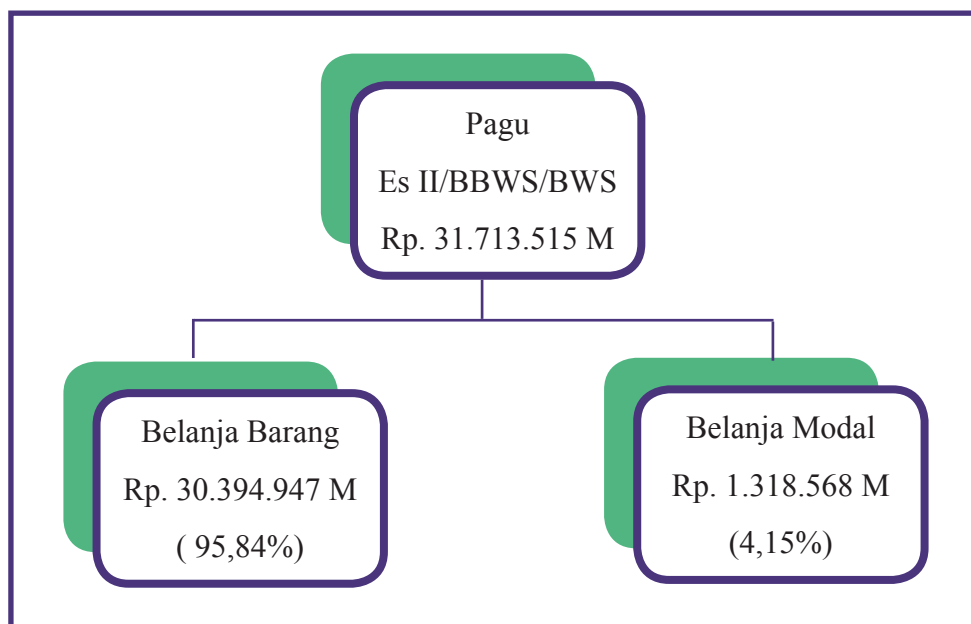
Anggaran tahun 2016 yang diperoleh oleh Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII berasal dari dana APBN dengan alokasi anggaran Rp. 31.713.515.000,- tercantum di dalam DIPA dengan Nomor SP-DIPA 033.06.1.400701/2016 melaksanakan anggaran sebagai berikut :

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Kode	Program/Kegiatan	Belanja		Total
		Barang	Modal	
1	2	4	5	6
5038	Peningkatan Tatakelola SDA Terpadu	4.543.742		5.862.310
5300	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA	25.851.205	-	25.851.205
Total Satuan Kerja		30.394.947	1.318.568	31.713.515

Tabel 3.2 Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII



Gambar 3.4 Pagu Anggaran Es II/BBWS/BWS

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

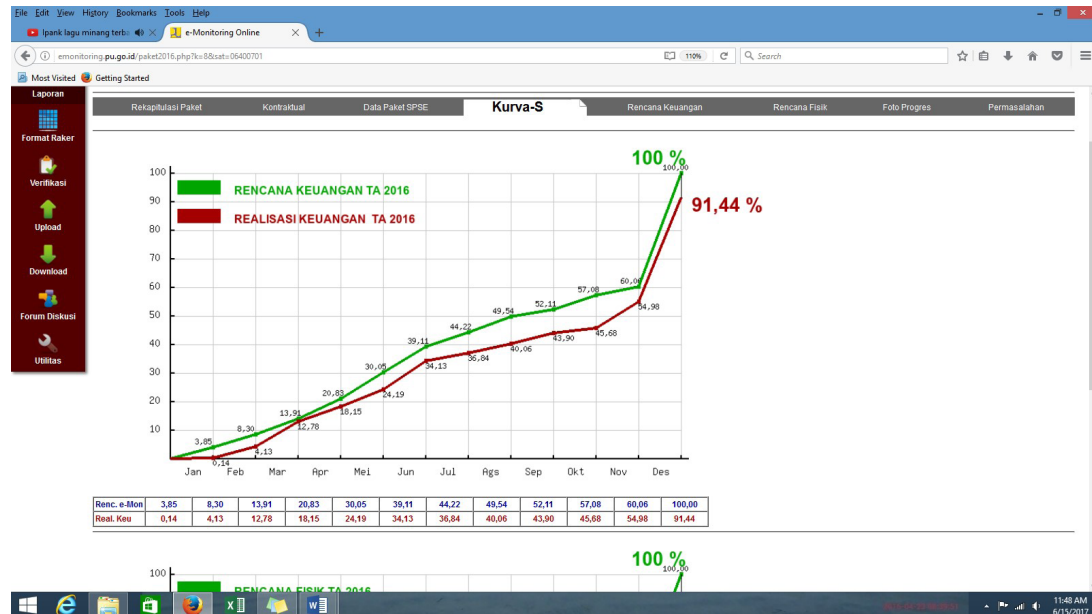


BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2016 Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII berhasil melaksanakan realisasi keuangan sebesar 91,44 persen, dimana pada awal pengajuan anggaran direncanakan terserap 100 persen sehingga terdapat deviasi sebesar 8,56 persen. Berikut adalah kurva S progress penyerapan rencana e-Monitoring terhadap realisasi tahun 2016.



Gambar 4.1 Rencana keuangan dan realisasi keuangan Satker OP SDA Sumatera VII

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

- Realisasi capaian kinerja triwulan I

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Dalam Ribuan)	Realisasi (Rp Dalam Ribuan)	Fisik		
					TW 1		
					RN	RL	Kinerja
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air						
1.	Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu		5.862.310	624.492	12,14	10,65	87,72
	Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu	9 Pemda/Masy./ Dunia Usaha	771.210	9.600	13,47	1,24	9,20
	Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan	100 %	100.000	-	0,00	0,00	0,00
	Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan	100%	600.000	14.400	14,77	2,40	16,24
	Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview	1 Dokumen	150.000	-	0,00	0,00	0,00
	Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola	100%	2.776.406	493.124	25,61	17,76	69,34
	Rekomendasi teknis yang diberikan	100%	150.000	22.491	20,99	14,99	71,41
	Alokasi air yang diberikan	100%	152.500	-	0,00	0,00	0,00
	Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	300.000	17.492	21,34	5,83	27,31
	Layanan perkantoran	12 Bulan	750.000	67.385	25,25	8,98	35,55
	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	29 Unit	112.198	-	0,00	0,00	0,00
2.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA		25.851.205	3.428.883	20,76	12,30	59,24
	Layanan teknis OP sarana prasarana SDA	9 Pemda/Masy./ Dunia Usaha	100.000	-	0,00	0,00	0,00
	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	5 Buah	1.922.530	93.127	17,87	4,85	27,14
	Bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	17 Km	15.542.977	1.357.410	21,78	7,72	35,44
	Sungai yang dipelihara	6 Sungai	3.262.022	1.111.745	27,41	32,22	117,54
	Danau yang dipelihara	9 Danau	1.947.262	319.274	25,98	16,37	63,01
	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	12,1 Km	597.830	123.225	27,13	20,54	75,70
	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	7 Bendung	2.478.210	424.102	25,19	15,89	63,08

Tabel 4.1 Realisasi capaian kinerja triwulan I Satker OP SDA Sumatera VII

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Penjelasan untuk tabel reaslisasi capaian kinerja triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu

- a. Layanan tata teknis kelola pengelolaan SDA terpadu mempunyai rencana 13,47 persen dan realisasi 1,24 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 9,20 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja.
- b. Komunikasi dan layanan public yang diselenggarakan mempunyai rencana 0,00 persen dan realisasi 0,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 0,00 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar kinerja.
- c. Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan mempunyai rencana 14,77 persen dan realisasi 2,40 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 16,24 persen dengan ini interpretasi kurang, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan pada triwulan ini.
- d. Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan pusat yang disusun/direview mempunyai rencana 0,00 persen dan realisasi 0,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 0,00 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Kegiatan belum dilaksanakan pada triwulan ini.
- e. Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola mempunyai rencana 25,61 persen dan realisasi 17,76 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 69,34 persen dengan nilai interpretasi baik, perlu sedikit perbaikan. Harus dilakukan percepatan kinerja pada triwulan berikutnya.
- f. Rekomendasi teknis yang diberikan mempunyai rencana 20,99 persen dan realisasi 14,99 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 71,41 persen dengan nilai interpretasi baik, perlu sedikit perbaikan koordinasi antara pimpinan dan anggota harus lebih ditingkatkan.
- g. Alokasi air yang diberikan mempunyai rencana 0,00 persen dan realisasi 0,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 0,00 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Pelaksanaan pekerjaan belum dilaksanakan di triwulan ini.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

- h. Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya mempunyai rencana 21,34 persen dan realisasi 5,83 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 27,31 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Beberapa kegiatan belum dilaksanakan pada triwulan ini.
- i. Layanan perkantoran mempunyai rencana 25,25 persen dan realisasi 8,98 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 35,56 persen dengan nilai interpretasi kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar. Beberapa kegiatan belum dilaksanakan pada triwulan ini.
- j. Perangkat pengolah data dan komunikasi mempunyai rencana 0,00 persen dan realisasi 0,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 0,00 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. Kegiatan tidak dilaksanakan pada triwulan ini tapi pada triwulan IV.

2. Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA

- a. Layanan teknis OP sarana prasarana SDA mempunyai rencana 0,00 persen dan realisasi 0,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 0,00 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Pelaksanaan pekerjaan belum dilaksanakan di triwulan ini.
- b. Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 17,87 persen dan realisasi 4,85 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 27,14 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Pimpinan kurang memantau jalannya kegiatan sehingga kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sejak awal.
- c. Bangunan pengaman pantai yang dipelihara mempunyai rencana 21,78 persen dan realisasi 7,72 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 35,44 persen dengan nilai interpretasi kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar. Pimpinan kurang memantau jalannya kegiatan sehingga kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sejak awal.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

- d. Sungai yang dipelihara mempunyai rencana 27,41 persen dan realisasi 32,22 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 117,54 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- e. Danau yang dipelihara mempunyai rencana 25,98 persen dan realisasi 16,37 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 63,01 persen dengan nilai interpretasi cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Pimpinan kurang memantau jalannya kegiatan sehingga kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sejak awal.
- f. Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 27,13 persen dan realisasi 20,54 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 75,70 persen dengan nilai interpretasi sangat baik.
- g. Bendung irigasi kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 25,19 persen dan realisasi 15,89 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 63,08 persen dengan nilai interpretasi cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Pimpinan kurang memantau jalannya kegiatan sehingga kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sejak awal.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

- Realisasi capaian kinerja triwulan II

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Dalam Ribuan)	Realisasi (Rp Dalam Ribuan)	Fisik		
					TW 1		
					RN	RL	Kinerja
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air						
1.	Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu		5.862.310	2.491.029	39,94	32,30	80,87
	Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu	9 Pemda/Masy./ Dunia Usaha	771.210	77.706	47,13	10,08	21,38
	Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan	100 %	100.000	-	0,00	0,00	0,00
	Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan	100%	600.000	179.690	48,23	29,95	62,09
	Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview	1 Dokumen	150.000	73.863	51,14	49,24	96,28
	Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola	100%	2.776.406	1.625.450	51,22	58,55	114,31
	Rekomendasi teknis yang diberikan	100%	150.000	110.900	54,32	73,93	136,10
	Alokasi air yang diberikan	100%	152.500	21.183	46,11	13,89	30,12
	Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	300.000	94.572	45,67	31,52	69,01
	Layanan perkantoran	12 Bulan	750.000	307.666	55,66	41,02	73,69
	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	29 Unit	112.198	-	0,00	0,00	0,00
2.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA		25.851.205	8.333.999	47,32	29,99	63,37
	Layanan teknis OP sarana prasarana SDA	9 Pemda/Masy./ Dunia Usaha	100.000	-	0,00	0,00	0,00
	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	5 Buah	1.922.530	503.787	54,55	26,05	47,75
	Bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	17 Km	15.542.977	2.435.333	55,01	13,86	25,19
	Sungai yang dipelihara	6 Sungai	3.262.022	2.660.505	55,98	75,66	135,15
	Danau yang dipelihara	9 Danau	1.947.262	878.071	55,31	44,95	81,26
	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	12,1 Km	597.830	479.127	54,77	79,85	145,79
	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	7 Bendung	2.478.210	1.377.177	55,68	51,49	192,47

Tabel 4.2 Realisasi capaian kinerja triwulan II Satker OP SDA Sumatera VII

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Penjelasan untuk tabel realisasi capaian kinerja triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tatakelola pengelolaan SDA terpadu

- a. Layanan tata teknis kelola pengelolaan SDA terpadu mempunyai rencana 47,13 persen dan realisasi 10,08 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 21,38 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Belum ada percepatan kinerja yang dilaksanakan pada triwulan ini.
- b. Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan mempunyai rencana 0,00 persen dan realisasi 0,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 0,00 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Pelaksanaan pekerjaan belum dilaksanakan di triwulan ini.
- c. Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan mempunyai rencana 48,23 persen dan realisasi 29,95 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 62,09 persen dengan nilai interpretasi cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan pada triwulan ini.
- d. Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan pusat yang disusun/direview mempunyai rencana 51,14 persen dan realisasi 49,24 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 96,28 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- e. Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola mempunyai rencana 58,55 persen dan realisasi 51,22 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 114,31 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- f. Rekomendasi teknis yang diberikan mempunyai rencana 54,32 persen dan realisasi 73,93 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 136,10 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- g. Alokasi air yang diberikan mempunyai rencana 13,89 persen dan realisasi 46,11 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 30,12 persen dengan nilai interpretasi kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar. Kurangnya koordinasi antara pemimpin dan pelaksana kegiatan menyebabkan lambatnya kinerja.
- h. Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya mempunyai

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

rencana 45,67 persen dan realisasi 31,52 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 69,01 persen dengan nilai interpretasi baik, perlu sedikit perbaikan. Perlu adanya percepatan kegiatan pada triwulan selanjutnya.

- i. Layanan perkantoran mempunyai rencana 55,66 persen dan realisasi 41,02 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 73,69 persen dengan nilai interpretasi kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar. Perlu dilakukan percepatan agar target tercapai pada triwulan selanjutnya.
- j. Perangkat pengolah data dan komunikasi mempunyai rencana 0,00 persen dan realisasi 0,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 0,00 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. Kegiatan tidak dilaksanakan pada triwulan ini tapi pada triwulan IV.

2. Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA

- a. Layanan teknis OP sarana prasarana SDA mempunyai rencana 0,00 persen dan realisasi 0,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 0,00 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Pelaksanaan pekerjaan belum dilaksanakan di triwulan ini.
- b. Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 54,55 persen dan realisasi 26,05 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 47,75 persen dengan nilai interpretasi kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar. Pengawasan dari pimpinan agak kendor sehingga tidak konsisten dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Bangunan pengaman pantai yang dipelihara mempunyai rencana 55,01 persen dan realisasi 13,86 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 25,19 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. Pengawasan dari pimpinan agak kendor sehingga tidak konsisten dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Sungai yang dipelihara mempunyai rencana 55,98 persen dan realisasi 75,66 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 135,15 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

- e. Danau yang dipelihara mempunyai rencana 55,31 persen dan realisasi 44,95 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 81,26 persen dengan nilai sangat baik.
- f. Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 54,77 persen dan realisasi 79,85 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 145,79 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- g. Bendung irigasi kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 55,68 persen dan realisasi 51,49 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 92,47 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

- Realisasi capaian kinerja triwulan III

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Dalam Ribuan)	Realisasi (Rp Dalam Ribuan)	Fisik		
					TW 1		
					RN	RL	Kinerja
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air						
1.	Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu		5.862.310	3.527.964	69,96	61,07	87,79
	Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu	9 Pemda/Masy./ Dunia Usaha	771.210	113.786	75,77	14,75	19,46
	Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan	100 %	100.000	99.871	81,20	99,87	122,99
	Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan	100%	600.000	291.615	76,55	48,60	63,48
	Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview	1 Dokumen	150.000	83.863	77,33	55,91	72,30
	Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola	100%	2.776.406	2.066.163	76,12	76,29	100,22
	Rekomendasi teknis yang diberikan	100%	150.000	132.500	81,15	88,33	108,84
	Alokasi air yang diberikan	100%	152.500	59.433	75,90	38,97	51,34
	Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	300.000	189.666	76,61	63,22	82,52
	Layanan perkantoran	12 Bulan	750.000	491.068	78,98	65,48	82,90
	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	29 Unit	112.198	-			
2.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA		25.851.205	10.393.041	67,46	41,35	82,90
	Layanan teknis OP sarana prasarana SDA	9 Pemda/Masy./ Dunia Usaha	100.000	-	0,00	0,000	0,00
	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	5 Buah	1.922.530	642.437	75,34	33,49	44,39
	Bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	17 Km	15.542.977	3.089.821	75,45	21,09	27,95
	Sungai yang dipelihara	6 Sungai	3.262.022	2.917.902	81,33	92,73	114,01
	Danau yang dipelihara	9 Danau	1.947.262	1.259.099	76,43	64,66	84,60
	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	12,1 Km	597.830	597.761	81,89	99,99	122,10
	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	7 Bendung	2.478.210	1.886.022	81,78	76,09	93,04

Tabel 4.3 Realisasi capaian kinerja triwulan III Satker OP SDA Sumatera VII

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Penjelasan untuk tabel realisasi capaian kinerja triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tatakelola pengelolaan SDA terpadu

- a. Layanan tata teknis kelola pengelolaan SDA terpadu mempunyai rencana 75,77 persen dan realisasi 14,75 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 19,46 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan Karena landasan hukum yang belum jelas.
- b. Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan mempunyai rencana 81,20 persen dan realisasi 99,87 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 122,99 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- c. Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan mempunyai rencana 76,55 persen dan realisasi 48,60 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 63,48 persen dengan nilai interpretasi cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan pada triwulan ini.
- d. Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan pusat yang disusun/direview mempunyai rencana 77,33 persen dan realisasi 55,91 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 72,30 persen dengan cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan pada triwulan ini.
- e. Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola mempunyai rencana 76,12 persen dan realisasi 76,29 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 100,22 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- f. Rekomendasi teknis yang diberikan mempunyai rencana 81,15 persen dan realisasi 88,33 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 108,84 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- g. Alokasi air yang diberikan mempunyai rencana 75,90 persen dan realisasi 38,97 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 51,34 persen dengan nilai interpretasi dengan cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Belum ada percepatan yang dilakukan pada triwulan ini dan tidak ada pengawasan dari pemimpin terhadap lambanya kinerja.
- h. Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya mempunyai

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

rencana 76,61 persen dan realisasi 63,22 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 82,52 persen dengan nilai interpretasi sangat baik.

- i. Layanan perkantoran mempunyai rencana 78,98 persen dan realisasi 65,48 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 82,90 persen dengan nilai interpretasi sangat baik.
- j. Perangkat pengolah data dan komunikasi mempunyai rencana 0,00 persen dan realisasi 0,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 0,00 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. Kegiatan tidak dilaksanakan pada triwulan ini tapi pada triwulan IV.

2. Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA

- a. Layanan teknis OP sarana prasarana SDA mempunyai rencana 0,00 persen dan realisasi 0,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 0,00 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Pelaksanaan pekerjaan belum dilaksanakan di triwulan ini masih menunggu dasar hukum yang jelas.
- b. Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 75,34 persen dan realisasi 21,09 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 27,95 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Pengawasan dari pimpinan agak kendor sehingga tidak konsisten dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Bangunan pengaman pantai yang dipelihara mempunyai rencana 75,45 persen dan realisasi 21,09 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 27,95 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. Pengawasan dari pimpinan agak kendor sehingga tidak konsisten dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Sungai yang dipelihara mempunyai rencana 92,73 persen dan realisasi 81,33 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 114,01 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- e. Danau yang dipelihara mempunyai rencana 76,43 persen dan realisasi 64,66 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 84,60 persen dengan nilai sangat

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

baik.

- f. Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 81,89 persen dan realisasi 99,99 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 122,10 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- g. Bendung irigasi kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 81,78 persen dan realisasi 76,09 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 93,04 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

- Realisasi capaian kinerja triwulan IV

No	Program/Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp Dalam Ribuan)	Realisasi (Rp Dalam Ribuan)	Fisik		
					TW 1		
					RN	RL	Kinerja
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air						
1.	Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu		5.862.310	5.253.791	97,74	89,68	91,75
	Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu	9 Pemda/Masy./ Dunia Usaha	771.210	499.315	92,13	64.74	70,27
	Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan	100 %	100.000	99.871	100	99.87	99,87
	Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan	100%	600.000	473.334	95,23	78,89	82,84
	Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview	1 Dokumen	150.000	126.303	95,78	84,20	87,90
	Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola	100%	2.776.406	2.707.944	100	97,66	97,66
	Rekomendasi teknis yang diberikan	100%	150.000	147.855	100	98,57	98,57
	Alokasi air yang diberikan	100%	152.500	140.823	100	92,34	92,34
	Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	300.000	274.943	95,45	91.65	96,01
	Layanan perkantoran	12 Bulan	750.000	674.237	98,88	89,90	90,91
	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	29 Unit	112.198	109.166	100	100	100
2.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA		25.851.205	24.046.553	94,18	94,18	100
	Layanan teknis OP sarana prasarana SDA	9 Pemda/Masy./ Dunia Usaha	100.000	-	0,00	0,00	0,00
	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	5 Buah	1.922.530	1.785.730	100	100	100
	Bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	17 Km	15.542.977	14.333.938	100	100	100
	Sungai yang dipelihara	6 Sungai	3.262.022	3.108.633	100	100	100
	Danau yang dipelihara	9 Danau	1.947.262	1.801.890	100	100	100
	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	12,1 Km	597.830	597.761	100	100	100
	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	7 Bendung	2.478.210	2.478.584	2.418.602	100	100

Tabel 4.4 Realisasi capaian kinerja triwulan IV Satker OP SDA Sumatera VII

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Penjelasan untuk tabel realisasi capaian kinerja triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan tatakelola pengelolaan SDA terpadu

- a. Layanan tata teknis kelola pengelolaan SDA terpadu mempunyai rencana 92,13 persen dan realisasi 64,74 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 70,27 persen dengan nilai interprestasi baik perlu sedikit perbaikan. Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan Karena adanya revisi RKA-K/L sehingga target belum tercapai di triwulan IV.
- b. Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan mempunyai rencana 100 persen dan realisasi 99,87 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 122,99 persen dengan nilai interprestasi memuaskan.
- c. Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan mempunyai rencana 95,23 persen dan realisasi 78,89 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 82,84 persen dengan nilai interprestasi sangat baik.
- d. Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan pusat yang disusun/direview mempunyai rencana 95,78 persen dan realisasi 84,20 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 87,90 persen dengan interprestasi memuaskan.
- e. Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola mempunyai rencana 100 persen dan realisasi 97,66 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 97,66 persen dengan nilai interprestasi memuaskan.
- f. Rekomendasi teknis yang diberikan mempunyai rencana 100 persen dan realisasi 98,57 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 98,57 persen dengan nilai interprestasi memuaskan.
- g. Alokasi air yang diberikan mempunyai rencana 100 persen dan realisasi 92,34 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 92,34 persen dengan nilai interprestasi memuaskan.
- h. Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya mempunyai rencana 95,45 persen dan realisasi 91,65 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 96,01 persen dengan nilai interprestasi memuaskan.
- i. Layanan perkantoran mempunyai rencana 98,88 persen dan realisasi 89,90 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 90,91 persen dengan nilai interprestasi memuaskan.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

- j. Perangkat pengolahan data dan komunikasi mempunyai rencana 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 100 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.

2. Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA

- a. Layanan teknis OP sarana prasarana SDA mempunyai rencana 0,00 persen dan realisasi 0,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 0,00 persen dengan nilai interpretasi sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar pada kinerja. Pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan Karena belum ada dasar hukum yang jelas.
- b. Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 100 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- c. Bangunan pengaman pantai yang dipelihara mempunyai rencana 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 100 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- d. Sungai yang dipelihara mempunyai rencana 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 100 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- e. Danau yang dipelihara mempunyai rencana 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 100 persen dengan nilai sangat baik.
- f. Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 100 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.
- g. Bendung irigasi kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara mempunyai rencana 100 persen dan realisasi 100 persen sehingga diperoleh capaian kinerja 100 persen dengan nilai interpretasi memuaskan.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.2 PERBANDINGAN KINERJA

Capaian yang didapat pada tahun ini meningkat dari capaian tahun lalu, hal ini terlihat dari tabel berikut ini :

No	Sasaran strategis/ sasaran program	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja tahun lalu	Capaian perjanjian kinerja tahun lalu	Target Kinerja Tahun ini	Capaian perjanjian kinerja tahun ini	target renstra tahun ini	capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya	capaian PK terhadap Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku									
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	1) Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	m ³ /detik	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	100	85,71
		3) Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	m ³ /detik	0,13	0,13	0,30	0,30	0,32	230,76	93,75
2	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	1) Peningkatan kapasitas tampung sumber air	juta m ³	48,89	48,89	36,39	36,39	110,82	74,43	32,83
		3) Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air	juta m ³	5,43	6,43	22,97	22,97	5,06	357,23	453,95
3	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air	1) Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	ha	352	352	138,56	138,56	610	39,36	22,71
4	Peningkatan RBO Indeks	1) Peningkatan RBO Indeks	Indeks	2,24	2,24	2,75	2,75	2,75	122,76	100
2	Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan ketahanan energi									
5	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	1) Peningkatan layanan jaringan irigasi	ha	1.600	1.600	7033	7033	2550	439,56	275,80
		2) Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	ha	11.005	11.005	500	500	15.384	4,54	3,24
		3) Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	ha	43,07	43,07	41,11	41,11	30,87	95,44	133,17

Tabel 4.5 Sandingan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016

Capaian kinerja tahun 2016 pada masing-masing indikator kinerja berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku 0,06 m³/detik.
2. Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku 0,30 m³/detik.
3. Peningkatan kapasitas tampung sumber air 36,39 juta m³.
4. Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air 22,97 juta m³.
5. Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air 138, 56 ha.
6. Peningkatan RBO indeks 2,75.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

7. Peningkatan layanan jaringan irigasi 7.033 ha.
8. Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi 500 ha.
9. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan 41,11 ha

Analisis perbandingan target kinerja tahun 2016 terhadap target Renstra hampir seluruhnya tercapai, hanya satu indikator kinerja yang tidak tercapai terhadap target Renstra yaitu peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air. Target renstra adalah 610 ha sedangkan capaian tahun ini adalah 138, 56 ha. hal ini disebabkan karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air adalah adanya pemotongan anggaran pada saat penajaman RKA-K/L sehingga beberapa paket kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat tercapai yang menyebabkan output kegiatan di tahun 2016 tidak dapat tercapai terhadap target Renstra 2016.

4.3 ANALISIS KINERJA

Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah berupaya untuk mencapai target pembangunan infrastruktur maupun penyerapan anggaran pada tahun 2016 ini. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan III progress fisik yang diperoleh untuk beberapa indikator kinerja melebihi target yang telah ditentukan, seperti Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi dengan progress fisik 93,52 persen, Jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi 95,74 persen, Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan telah mencapai progress fisik 100 persen dan Tembok penahan gelombang (sea wall) yang dibangun/ditingkatkan juga telah mencapai progress fisik 100 persen. Selain itu penyerapan anggaran juga mengalami kenaikan yang cukup significant di mana percepatan penyerapan sudah mulai terlihat di triwulan III sehingga pada triwulan IV penyerapan anggaran dapat sesuai target. Namun untuk beberapa Indikator kinerja pada Satker BWS Sumatera VII dan Satker OP Sumatera VII penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh ada beberapa kegiatan yang dihilangkan karena kegiatannya tumpang tindih dengan kegiatan yang lain dengan kata lain mempunyai kegiatan yang sama. Selain itu ada juga kegiatan yang ragu-ragu untuk dilaksanakan karena dasar hukum yang belum jelas sehingga terjadi penundaan hingga di akhir triwulan

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

IV kejelasan tentang dasar hukum pelaksanaan kegiatan belum juga dikeluarkan oleh Kementerian PUPR dan kegiatan akhirnya tidak jadi dilaksanakan.

Selain itu masing-masing indikator kinerja memberikan manfaat juga terhadap masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan jaringan irigasi. Beberapa manfaat yang diterima oleh masyarakat adalah :
 - a. Manfaat yang diperoleh dari berhasilnya capaian kinerja indikator kinerja peningkatan layanan.
 - b. Terjaminnya kontinuitas ketersediaan air untuk pertanian secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan nawacita.
 - c. Menciptakan swasembada pangan beras.
 - d. Meningkatnya hasil produksi padi.
2. Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi, manfaat yang diterima masyarakat adalah :
 - a. Menjaga debit air tetap maksimal.
 - b. Meningkatkan fungsi bangunan bagi.
 - c. Mempermudah akses petani untuk mengangkut hasil pertanian.
 - d. Tersedianya air untuk are fungsional sesuai dengan kebutuhan.
3. Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, manfaat yang diterima antara lain :
 - a. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
 - b. Terpenuhinya pelayanan air minum penduduk di Kecamatan Padang Jaya dengan cakupan yang lebih luas dan menyeluruh dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.
4. Peningkatan kapasitas tampung sumber air, masyarakat menerima manfaat seperti :
 - a. Terlindungnya permukiman penduduk.
 - b. Terlindungnya jalan wisata.
 - c. Terlindungnya kawasan parawisata tempat sebahagian masyarakat yang bermata pencaharian pedagang.
 - d. Terlindungnya daerah pertanian masyarakat sekitar bangunan.

Untuk beberapa indikator kinerja tahun 2016 merupakan keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Adanya kesadaran dan pengawasan yang ketat dari pimpinan terhadap pelaksana kegiatan untuk konsisten pada rencana (target) pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal penandatanganan kontrak, sehingga pada triwulan III beberapa indikator kinerja dapat mencapai target bahkan ada yang melebihi target.
2. Peralatan yang digunakan sudah menggunakan teknologi terbaru sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, selain itu dampaknya adalah waktu menjadi lebih efisien dan percepatan kinerja dapat dilaksanakan.
3. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan SPEC yang tertera di dalam kontrak pekerjaan.
4. Direksi pekerjaan diperintahkan oleh PPK untuk rutin menghitung volume pekerjaan setiap bulan secara teliti sehingga bila hitungan sudah final segera dilaporkan ke PPK untuk di evaluasi.
5. Tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan studi di lapangan.
6. Setiap dua minggu direksi pekerjaan melakukan monitoring ke lapangan.
7. Adanya aturan yang tegas bahwa pihak konsultan sebagai penyedia jasa tidak bisa melakukan termin apabila laporan pekerjaan belum dilaporkan ke direksi pekerjaan dan di setujui oleh PPK.
8. Melaksanakan pertemuan dengan masyarakat termasuk mengundang para tokoh masyarakat dan pejabat yang berwenang di lokasi pekerjaan terkait dengan pekerjaan yang sedang dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketidaksepakatan yang berdampak pada tertundanya pekerjaan apabila hal-hal seperti ini terjadi.

Namun demikian terdapat juga indikator kinerja yang belum bisa mencapai target pencapaian kinerja. Faktor yang menjadi penyebab kegagalan antara lain :

1. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena menunggu dasar hukum yang jelas dari Kementerian PUPR.
2. Adanya pemotongan anggaran di triwulan IV sehingga beberapa kegiatan tidak maksimal dalam pelaksanaannya.
3. Adanya tumpang tindih kegiatan swakelola dengan judul kegiatan yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama sehingga beberapa kegiatan yang sama harus dihapuskan.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.4 REALISASI ANGGARAN

Satker OP SDA Sumatera VII menjalankan kegiatan menggunakan anggaran DIPA APBN rupiah murni dengan anggaran DIPA sebesar Rp. 20.831.880.000 -.

Pada triwulan IV terjadi revisi RKA-K/L yang menyebabkan perubahan pagu DIPA menjadi Rp. 31.713.515.000,-. Realisasi anggaran hingga akhir tahun 2016 sebesar Rp. 28.986.334.000,- atau 91,44 persen. Bila disandingkan dengan anggaran PAGU DIPA tahun 2015 dengan realisasi sebesar Rp. 30.300.733.000 -, atau 94,37 persen maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp. 1.314.399.000,-.

BAB V PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengembangan kelembagaan. Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII bertanggung jawab kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII mempunyai 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I, PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II, dan PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA III. Dalam pelaksanaannya didukung dengan pengawasan internal, dukungan manajemen serta pengembangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA adalah dalam upaya mencapai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019.

Pencapaian kinerja Satker OP SDA Sumatera VII tahun anggaran 2016 menghasilkan kinerja realisasi anggaran sebesar Rp 29.300.344,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 31.713.515,- dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar 92,39% dan pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan fisik sebesar 93,35%.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam upaya mencapai sasaran strategis pada tahun anggaran 2016. Sasaran strategis itu sendiri tercermin dalam indikator Kinerja Utama yang menjadi gambaran kinerja secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, berbagai kendala dan tantangan telah dilalui dan diatasi, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat dituntaskan. Hal itu sesuai dengan motto Kementerian PU, yaitu: “Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat” dan tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang dapat memenuhi target, walaupun masih terdapat juga sejumlah indikator kinerja yang belum optimal pencapaiannya.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, transparan, dan akuntabel kepada seluruh pihak stakeholder, terutama terkait perencanaan kedepan, sehingga kemudian dapat memberikan feedback

untuk peningkatan kinerja berikutnya dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

5.2 REKOMENDASI DAN HARAPAN

Berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII secara umum dan khususnya pada tahun 2106, maka terdapat beberapa hal yang membutuhkan perhatian dalam rangka peningkatan kinerja kedepan, yaitu:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan target kinerja yang lebih akurat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya. Termasuk dukungan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler dan berkala untuk dapat mengendalikan kinerja dengan mengembangkan dan memperbaharui basis data infrastruktur Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII yang sudah terlaksana dan sedang dilaksanakan.
- 2) Meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan kapasitas sumber daya aparatur dalam bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, baik secara teknis (perencanaan dan pelaksanaan, serta penelitian dan pengembangan) maupun non teknis (berupa dukungan manajemen dan pengawasan). Hal itu dapat dilaksanakan melalui mengirimkan pegawai di jajaran Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII untuk mengikuti pelatihan, pendidikan vokasi, dan pengelolaan jenjang karir.
- 3) Berkurangnya jumlah pegawai yang masuk masa pensiun, meninggal, berhenti dan atau pindah dan disisi lain pemerintahan baru memberlakukan moratorium PNS/CPNS baru.
- 4) Percepatan Proses Pengadaan, Upaya percepatan proses pengadaan telah dilakukan dengan dukungan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang secara rutin melakukan pemantauan terhadap proses pengadaan.
- 5) Menyusun rencana pengawasan dengan menyesuaikan pada pembangunan jangka menengah, menerapkan Risk Base Internal Audit, meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pedoman kendali mutu audit, serta pelibatan/partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

BAB V

PENUTUP

- 6) Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan Agung dan Kepolisian) dalam penanganan tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan tindak pidana korupsi maupun dalam penanganan pengaduan masyarakat, serta dengan aparat pengawasan fungsional lainnya (BPKP dan Inspektorat)

LAMPIRAN FOTO

O&P PRASARANA PENGAMAN PANTAI PUNGGUR

Untuk Mendukung Sasaran :

Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

Uraian Singkat :

Pantai Punggur sering terkena abrasi akibat hantaman ombak yang kuat, selain itu menyebabkan jalan di pinggir pantai sering terjadi longsor, armor pemecah gelombang yang ada sekarang mengalami kerusakan dan armor-armor tersebut banyak terbawa oleh air laut sehingga tidak berfungsi secara maksimal, untuk itu harus ditambahkan armor dengan batu-batu gajah yang dibawahnya dipasang lapisan geotekstil agar armor tersebut tidak mudah terseret oleh hantaman ombak yang kuat

Manfaat :

- Sebagai jalan nasional
- Sebagai penahan abrasi dari hantaman ombak air laut



0%



25%



50%



75%



100%

O&P PRASARANA PENGAMAN PANTAI PANJANG

Untuk Mendukung Sasaran :

Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

Uraian Singkat :

Pantai Panjang Bengkulu sering terkena abrasi akibat hantaman ombak yang kuat, dan akibat tumpukan pasir yang sudah padat menutupi tanggul laut buis beton tersebut, sehingga tanggul laut buis beton sering mengalami kerusakan dan tidak berfungsi lagi secara maksimal, oleh karena itu tanggul laut buis beton yang rusak di sekitar pinggir jalan wisata dan pemukiman penduduk diperbaiki dengan menambahkan cor beton pada bagian buis beton yang rusak, agar dapat berfungsi kembali dengan baik

Manfaat :

- Sebagai pengaman jalan wisata
- Sebagai pengaman pemukiman penduduk
- Sebagai penahan abrasi dari hantaman ombak air laut



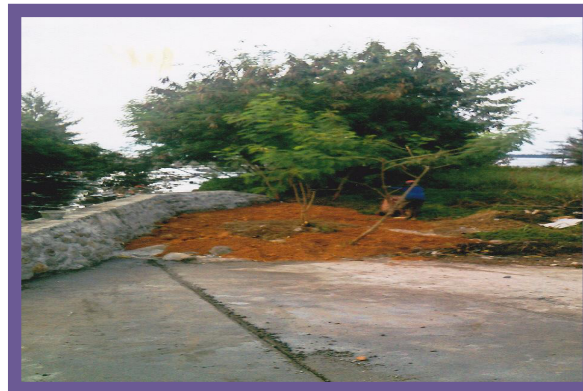
0%



25%



50%



75%



100%

O&P PRASARANA PENGAMAN PANTAI LAIS-SERANGAI

Untuk Mendukung Sasaran :

Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

Uraian Singkat :

Pantai Lais-Serangai sering terkena abrasi akibat hantaman ombak yang kuat, selain itu menyebabkan jalan di pinggir pantai sering terjadi longsor, armor pemecah gelombang yang ada sekarang mengalami kerusakan dan armor-armor tersebut banyak terbawa oleh air laut sehingga tidak berfungsi secara maksimal, untuk itu harus ditambahkan armor dengan batu-batu gajah yang dibawahnya dipasang lapisan geotekstil agar armor tersebut tidak mudah terseret oleh hantaman ombak yang kuat

Manfaat :

- Sebagai jalan nasional
- Sebagai penahan abrasi dan tanah longsor



0%



25%



50%



75%



100%

O & P PRASARANA NORMALISASI DRAINASE AIR BENGKULU

Untuk Mendukung Sasaran :

Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

Uraian Singkat :

Sungai Air Bengkulu mempunyai panjang sungai 26,95 km dan DAS Air Bengkulu seluas 580,81 km², untuk tanggul banjir Air Bengkulu sudah dibangun sepanjang 5,265 km

Manfaat :

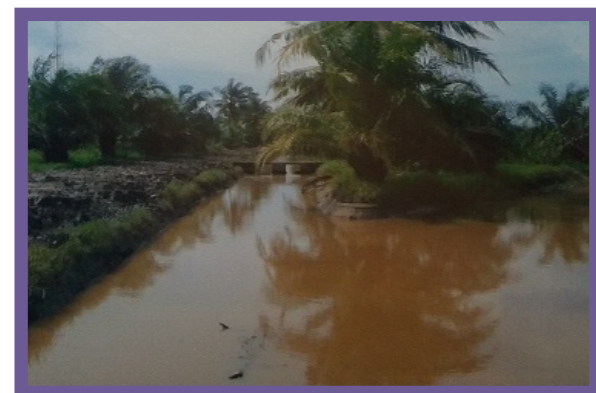
Dilakukan pengurasan sedimen lumpur dengan menggunakan alat berat pada saluran drainase Air Bengkulu agar kapasitas tampungan air pada saluran semakin terjaga untuk mengtasi banjir, karena apabila tidak diambil sedimennya, debit air yang berada pada saluran tersebut meluap sehingga dapat terjadi banjir dan sebagai pengendali banjir



0%



50%



100%

O & P PRASARANA PENGENDALI BANJIR AIR MANJUTO

Untuk Mendukung Sasaran :

Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

Uraian Singkat :

Sungai Air Manjuto mempunyai panjang sungai 105,24 km dan DAS Air Manjuto seluas 1566,08 km², untuk tanggul banjir Air Manjuto yang sudah dibangun sepanjang 4,45 km dan revetment turap beton sepanjang 0,3 km

Manfaat :

Untuk pengaman bangunan pada sayap bendung dan sebagai pengendali banjir supaya tidak terjadi erosi.



0%



25%



50%



75%



100%

O & P PRASARANA PENGENDALI BANJIR AIR KETAHUN

Untuk Mendukung Sasaran :

Meningkatnya kinerja layanan irigasi

Uraian Singkat :

Bendung Air Ketahun merupakan Bendung Tetap, dengan tinggi bendung 2,9 meter dan lebar mercu bendung bentang 49,7 meter, bendung ini mengairi 3000 ha sawah, dengan panjang saluran primer 14.373 km dan 0,359 km saluran skunder

Manfaat :

Dibuat pelapis batu kali pada saluran, agar bangunan tersebut terjaga dari akibat longsor dan juga apabila terjadi debit air sungai yang besar, saluran tersebut yang tadinya tidak dapat menampung debit air yang besar, setelah dibangun saluran tersebut dapat menampung debit air yang besar sehingga terhindar dari banjir



0%



25%



50%



75%



100%

O & P PRASARANA PENGENDALI BANJIR AIR SELAGAN

Untuk Mendukung Sasaran :

Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

Uraian Singkat :

Sungai Air Selagan mempunyai panjang sungai 70 km dan DAS Air Selagan seluas 747,90 km², untuk tanggul banjir Air Selagan yang sudah dibangun sepanjang 3 km dan revetment turap beton sepanjang 0,2 km

Manfaat :

Untuk pengaman jalan inspeksi, pemukiman dan sebagai pengendali banjir supaya tidak terjadi erosi



0%



25%



50%



75%



100%

O & P DANAU DENDAM TAK SUDAH

Untuk Mendukung Sasaran :

Penggalian potensi sumber daya alam danau

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Danau Dendam Tak Sudah digunakan untuk kebutuhan air irigasi oleh masyarakat di sekitar danau tersebut dan secara umum juga danau tersebut dijadikan kawasan pariwisata.

Manfaat :

Untuk melestarikan keberadaan kondisi danau sebagai sumber daya alam baik untuk pertanian maupun sebagai obyek wisata sehingga dapat terjaminnya pemanfaatan dan fungsi danau



0%



25%



50%



75%



100%

O & P DANAU PICUNG

Untuk Mendukung Sasaran :

Penggalian potensi sumber daya alam danau

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Danau Picung digunakan untuk kebutuhan air irigasi oleh masyarakat di sekitar danau tersebut dan secara umum juga danau tersebut dijadikan kawasan pariwisata.

Manfaat :

Untuk melestarikan keberadaan kondisi danau sebagai sumber daya alam baik untuk pertanian maupun sebagai obyek wisata sehingga dapat terjaminnya pemanfaatan dan fungsi danau



0%



25%



50%



75%



100%

O & P DANAU LEBAR

Untuk Mendukung Sasaran :

Penggalian potensi sumber daya alam danau

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Danau Lebar digunakan untuk kebutuhan air irigasi oleh masyarakat di sekitar danau tersebut dan secara umum juga danau tersebut dijadikan kawasan pariwisata.

Manfaat :

Untuk melestarikan keberadaan kondisi danau sebagai sumber daya alam baik untuk pertanian maupun sebagai obyek wisata sehingga dapat terjaminnya pemanfaatan dan fungsi danau



0%



25%



50%



75%



100%

O & P DANAU MAS HARUN BASTARI

Untuk Mendukung Sasaran :

Penggalian potensi sumber daya alam danau

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Danau Mas Harun Bastari digunakan untuk kebutuhan air irigasi oleh masyarakat di sekitar danau tersebut dan secara umum juga danau tersebut dijadikan kawasan pariwisata.

Manfaat :

Untuk melestarikan keberadaan kondisi danau sebagai sumber daya alam baik untuk pertanian maupun sebagai obyek wisata sehingga dapat terjaminnya pemanfaatan dan fungsi danau



0%



25%



50%



75%



100%

O & P DANAU NIBUNG

Untuk Mendukung Sasaran :

Penggalian potensi sumber daya alam danau

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Danau Nibung digunakan untuk kebutuhan air irigasi oleh masyarakat di sekitar danau tersebut dan secara umum juga danau tersebut dijadikan kawasan pariwisata.

Manfaat :

Untuk melestarikan keberadaan kondisi danau sebagai sumber daya alam baik untuk pertanian maupun sebagai obyek wisata sehingga dapat terjaminnya pemanfaatan dan fungsi danau



0%



25%



50%



75%



100%

O&P BENDUNG AIR MANJUTO

Untuk Mendukung Sasaran :

Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana bendung

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Bendung Air Manjuto adalah untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana yang ada agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya

Manfaat :

Mendukung fungsi bendung untuk memenuhi debit sesuai kebutuhan sehingga dapat meningkatkan sektor pertanian dan juga adanya peningkatan penghasilan masyarakat sekitar



0%



25%



50%



75%



100%

O&P BENDUNG AIR KETAHUN

Untuk Mendukung Sasaran :

Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana bendung

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Bendung Air Ketahun adalah untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana yang ada agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya

Manfaat :

Mendukung fungsi bendung untuk memenuhi debit sesuai kebutuhan sehingga dapat meningkatkan sektor pertanian dan juga adanya peningkatan penghasilan masyarakat sekitar



0%



25%



50%



75%



100%

O & P PRASARANA PENGAMAN PANTAI LINAU

Untuk Mendukung Sasaran :

Meminimalkan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam.

Uraian Singkat :

Mengoptimalkan fungsi Prasarana Pengaman Pantai yang telah dibangun dan mengupayakan agar umur teknis bangunan tersebut dapat dipertahankan sesuai rencana desainnya.

Manfaat :

Mencegah terjadinya kerusakan dalam upaya meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh gelombang pasang serta mengurangi / menghilangkan beban moril masyarakat pesisir pantai disekitar lokasi Bangunan Pengaman Pantai tersebut terhadap bencana akibat gelombang pasang



0%



25%



50%



75%



100%

O & P PRASARANA PENGAMAN PANTAI PASAR BAWAH MANNA

Untuk Mendukung Sasaran :

Meminimalkan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam.

Uraian Singkat :

Mengoptimalkan fungsi Prasarana Pengaman Pantai yang telah dibangun dan mengupayakan agar umur teknis bangunan tersebut dapat dipertahankan sesuai rencana desainnya.

Manfaat :

Mencegah terjadinya kerusakan dalam upaya meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh gelombang pasang serta mengurangi / menghilangkan beban moril masyarakat pesisir pantai disekitar lokasi Bangunan Pengaman Pantai tersebut terhadap bencana akibat gelombang pasang



0%



25%



50%



75%



100%

O & P PRASARANA PENGENDALI BANJIR AIR NIPIS

Untuk Mendukung Sasaran :

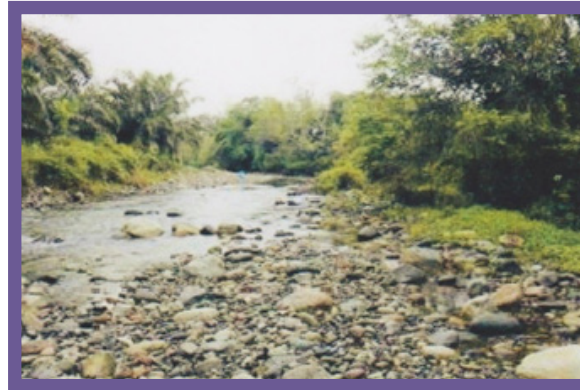
Mencegah kerusakan akibat bencana banjir

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Prasarana Pengendali Banjir Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan adalah untuk mengoptimalkan fungsi Sarana Pengendali Banjir yang telah dibangun dan agar usia teknis bangunan tersebut dapat dipertahankan sesuai rencana desainnya

Manfaat :

Mencegah terjadinya kerusakan dalam upaya meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir serta mengurangi beban moral dan kejiwaan masyarakat yang berada di sekitar lokasi bangunan Pengendali Banjir tersebut



0%



25%



50%



75%



100%

O & P DANAU RUKIS

Untuk Mendukung Sasaran :

Penggalian potensi sumber daya alam danau

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Danau Rukis Kabupaten Bengkulu Selatan digunakan untuk kebutuhan air irigasi oleh masyarakat di sekitar danau tersebut dan secara umum juga danau tersebut dijadikan kawasan pariwisata.

Manfaat :

Untuk melestarikan keberadaan kondisi danau sebagai sumber daya alam baik untuk pertanian maupun sebagai obyek wisata sehingga dapat terjaminnya pemanfaatan dan fungsi danau



0%



25%



50%



75%



100%

O & P DANAU HILIR

Untuk Mendukung Sasaran :

Penggalian potensi sumber daya alam danau

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Danau Hilir Kabupaten Bengkulu Selatan digunakan untuk kebutuhan air irigasi oleh masyarakat di sekitar danau tersebut dan secara umum juga danau tersebut dijadikan kawasan pariwisata.

Manfaat :

Untuk melestarikan keberadaan kondisi danau sebagai sumber daya alam baik untuk pertanian maupun sebagai obyek wisata sehingga dapat terjaminnya pemanfaatan dan fungsi danau



0%



25%



50%



75%



100%

O & P DANAU HULU

Untuk Mendukung Sasaran :

Penggalian potensi sumber daya alam danau

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Danau Hulu Kabupaten Bengkulu Selatan digunakan untuk kebutuhan air irigasi oleh masyarakat di sekitar danau tersebut dan secara umum juga danau tersebut dijadikan kawasan pariwisata.

Manfaat :

Untuk melestarikan keberadaan kondisi danau sebagai sumber daya alam baik untuk pertanian maupun sebagai obyek wisata sehingga dapat terjaminnya pemanfaatan dan fungsi danau



0%



25%



50%



75%



100%

O & P DANAU TEBAT BESAR

Untuk Mendukung Sasaran :

Penggalian potensi sumber daya alam danau

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Danau Tebat Besar Kabupaten Bengkulu Selatan digunakan untuk kebutuhan air irigasi oleh masyarakat di sekitar danau tersebut dan secara umum juga danau tersebut dijadikan kawasan pariwisata.

Manfaat :

Untuk melestarikan keberadaan kondisi danau sebagai sumber daya alam baik untuk pertanian maupun sebagai obyek wisata sehingga dapat terjaminnya pemanfaatan dan fungsi danau



0%



25%



50%



75%



100%

O&P BENDUNG AIR SELUMA

Untuk Mendukung Sasaran :

Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana bendung

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Bendung Air Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan adalah untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana yang ada agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya

Manfaat :

Mendukung fungsi bendung untuk memenuhi debit sesuai kebutuhan sehingga dapat meningkatkan sektor pertanian dan juga adanya peningkatan penghasilan masyarakat sekitar



0%



25%



50%



75%



100%

O&P BENDUNG AIR NIPIS

Untuk Mendukung Sasaran :

Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana bendung

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Bendung Air Nipis adalah untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana yang ada agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya

Manfaat :

Mendukung fungsi bendung untuk memenuhi debit sesuai kebutuhan sehingga dapat meningkatkan sektor pertanian dan juga adanya peningkatan penghasilan masyarakat sekitar



0%



25%



50%



75%



100%

O&P BENDUNG AIR ALAS

Untuk Mendukung Sasaran :

Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana bendung

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Bendung Air Alas adalah untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana yang ada agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya

Manfaat :

Mendukung fungsi bendung untuk memenuhi debit sesuai kebutuhan sehingga dapat meningkatkan sektor pertanian dan juga adanya peningkatan penghasilan masyarakat sekitar



0%



25%



50%



75%



100%

O&P PRASARANA PENGAMAN TEBING BENDUNG AIR SELUMA

Untuk Mendukung Sasaran :

Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana bendung

Uraian Singkat :

Pekerjaan O&P Prasarana Pengaman Tebing Bendung Air Seluma adalah untuk menjaga fungsi prasarana yang ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal

Manfaat :

Mendukung fungsi bendung untuk memenuhi debit sesuai kebutuhan sehingga dapat meningkatkan sektor pertanian dan juga adanya peningkatan penghasilan masyarakat sekitar



0%



25%



50%



75%



100%

Balai Wilayah Sungai Sumatera VII

JL. Batanghari No. 25 Kec. Ratu Agung Bengkulu 38223

Tel. 0736 341405

Fax. 0736 341405

Email : bwssumatera7@pu.go.id

© 2016

SISDA BWS SUMATERA VII